PENGARUH PENGETAHUAN REGULASI MEDIA TERHADAP KEMAMPUAN *MEDIA RELATIONS* DI HUMAS PERGURUAN TINGGI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Oleh

FARAH FADILA ARINALHAQ

21321267

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN REGULASI MEDIA TERHADAP KEMAMPUAN MEDIA RELATIONS DI HUMAS PERGURUAN TINGGI

Oleh:

FARAH FADILA ARINALHAQ

21321267

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: 16 November 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi



Puji Rianto, S.IP., M.A.

NIDN. 0503057601

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN REGULASI MEDIA TERHADAP KEMAMPUAN MEDIA RELATIONS DI HUMAS PERGURUAN TINGGI

Disusun oleh:

FARAH FADILA ARINALHAQ

21321267

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Sabtu
Tanggal : 18 Januari 2025

Dosen Penguji :

Ketua : **Puji Rianto, S.IP., M.A.** (_____)
NIDN. 0503057601

Anggota : **Narayana Mahendra Prastya, S. Sos, M.A.** (_____)
NIDN. 0520058402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D.

NIDN. 0506038201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farah Fadila Arinalhaq

Nomor Mahasiswa : 21321267

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini, saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 26 November 2024
Yang menyatakan,



(.....)
Farah Fadila Arinalhaq
Nim: 21321267

MOTTO

"Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that's me, too. These Faults and mistakes are what I am, making up the brightest starts in the constellation of my life. I have come to love myself for who I was, who I am, and who I hope to become"

-Kim Namjoon

"You were born to be real, not to be perfect. Life is tough, and things don't always work out well, but we should be brave and go on with our lives"

-Min Yoongi

"Never give up on a dream that you've been chasing almost your whole life. There is beauty in everything; it's just that not everyone sees it"

-Park Jimin

"Go on your path, even if you live for a day. Do something, put away your weakness"

No More Dream - BTS

PERSEMBAHAN

"Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bukti nyata dunia perkuliahan yang penuh akan perjuangan, komitmen, dan semangat dalam menggapai mimpi. Saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan pembuktian diri kepada kedua orang tua, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan ini"

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
1. Manfaat Teoritis 6
2. Manfaat Praktis 6
E. Tinjauan Pustaka 7
1. Penelitian Terdahulu 7
2. Tinjauan Teoritis 9
F. Hipotesis Penelitian 20
G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 20
1. Definisi Konseptual 20
2. Definisi Operasional 24
H. Metode Penelitian 26
1. Jenis Penelitian 26
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 26
3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 26
4. Jenis Data 27
5. Pengumpulan Data 27
6. Pengolahan Data 28
7. Analisis Data 28
BAB II **34**
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN **34**
A. Peran Humas di Perguruan Tinggi 34

B. Pemaknaan Humas di Perguruan Tinggi 35
BAB III 43
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Temuan Penelitian 43
1. Karakteristik Responden..... 43
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian..... 47
3. Hasil Uji Instrumen Penelitian 58
4. Hasil Pengujian Prasyarat Analisis 61
5. Hasil Pengujian Hipotesis..... 64
B. Pembahasan 65
BAB IV..... 71
PENUTUP 71
A. Simpulan..... 71
B. Keterbatasan Penelitian 72
C. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 77

ABSTRAK

Farah Fadila Arinalhaq (2024). Pengaruh Pengetahuan Regulasi Media terhadap Kemampuan Media Relations di Humas Perguruan Tinggi. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Hubungan antara humas dan wartawan dapat dianalogikan sebagai hubungan cinta-benci. Perbedaan budaya profesi dapat menimbulkan berbagai polemik, seperti pelanggaran hukum oleh humas atau sengketa pemberitaan oleh wartawan. Dalam mengelola permasalahan yang timbul, setiap upaya yang dipilih oleh humas akan berdampak pada konsekuensi yang serius terhadap hubungan media yang telah terjalin. Dalam konteks ini, pengetahuan regulasi media berperan penting dalam membekali praktisi humas dalam mengelola hubungan media yang baik.

Penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan media relations humas perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data disebarkan melalui kuesioner online dan dianalisis menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 25. Metode yang digunakan adalah regresi non-linear dengan model quadratic. Populasi penelitian ini adalah humas perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 126, dan sampel sebanyak 32 orang diperoleh dari 18 perguruan tinggi. Terdapat 40 pernyataan yang dinyatakan valid dan dua variabel yang reliabel yaitu pengetahuan regulasi media dan kemampuan media relations

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan media relations di humas perguruan tinggi. Pengetahuan regulasi media berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemampuan media relations. Sebesar 58,3% variasi dalam kemampuan media relations dapat dijelaskan oleh pengetahuan regulasi media. Penelitian ini juga menemukan tingkat pengetahuan regulasi media dan kemampuan *media relations* humas di perguruan tinggi Yogyakarta termasuk dalam kategori tinggi

Kata Kunci: Hubungan Masyarakat*, Media Relations,* Regulasi Media, Pengetahuan Regulasi, Perguruan Tinggi Yogyakarta

ABSTRACT

Farah Fadila Arinalhaq (2024). The Effect of Media Regulation Knowledge on Media Relations Skills in Higher Education Public Relations. Communication Science Study Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Universitas Islam Indonesia

The relationship between public relations and journalists can be likened to a love-hate relationship. Differences in professional culture can cause various polemics, such as violations of the law by public relations or disputes over news reporting by journalists. In managing the problems that arise, every effort chosen by public relations will have serious consequences for the media relations that have been established. In this context, knowledge of media regulations plays an important role in equipping public relations practitioners in managing good media relations.

This study examines whether there is an influence of media regulation knowledge on the media relations skills of higher education public relations. This study uses a quantitative approach, where data is distributed through an online questionnaire and analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25. The method used is non-linear regression with a quadratic model. The population of this study was 126 public relations officers of higher education in the Daerah Istimewa Yogyakarta, and a sample of 32 people was obtained from 18 universities. There are 40 statements that are declared valid and two reliable variables, namely media regulation knowledge and media relations skills

The results of the study indicate that there is an influence between media regulation knowledge and media relations skills in university public relations. Media regulation knowledge has a positive and significant effect on media relations skills. As much as 58.3% of the variation in media relations skills can be explained by media regulation knowledge. This study also found that the level of media regulation knowledge and media relations skills of public relations in Yogyakarta universities are included in the high category

***Keywords**: Public Relations, Media Relations, Media Regulation, Regulation Knowledge, Yogyakarta Universities*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala bentuk rahmat, ilmu, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Rasa syukur tak hentinya dipanjatkan, sehingga skripsi yang berjudul "**Pengaruh Pengetahuan Regulasi Media terhadap Kemampuan Media Relations di Humas Perguruan Tinggi"** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Penulis memahami bahwa tanpa bantuan ridho Allah SWT, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Dengan segenap ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, ridho, dan karunia-Nya. Atas segala nikmat kesehatan, kekuatan, dan kemudahan yang dianugerahkan, serta atas rezeki dan ilmu yang dilimpahkan selama penulis menempuh pendidikan. Tanpa pertolongan dan bimbingan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Masruri dan Mamah Alfiyah, tiada kata yang mampu melukiskan rasa syukur dan terima kasih penulis atas kesempatan terlahir dan dibesarkan oleh orang tua terhebat sepanjang masa. Terima kasih atas didikan, doa, dan dukungan moral maupun materil yang tak terhingga. Kepada Kakak Feni dan Kakak Firlina terima kasih telah atas motivasi, inspirasi, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis
3. Bapak Puji Rianto, S.IP., MA. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai

4. Responden, khususnya kepada seluruh praktisi humas dan pihak perguruan tinggi yang telah berkenan memberikan izin serta meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitiaan ini
5. Seluruh dosen Prodi Ilmu Komunikasi, staf Prodi, teman-teman, dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah berperan dalam perjalanan akademik penulis

Dengan kerendahan hati, penulis mengakui bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun guna menyempurnakan karya ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam perkembangan Ilmu Komunikasi. Semoga Allah SWT meridhoi dan menerima usaha ini sebagai bentuk amal ibadah. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 21 Januari 2025



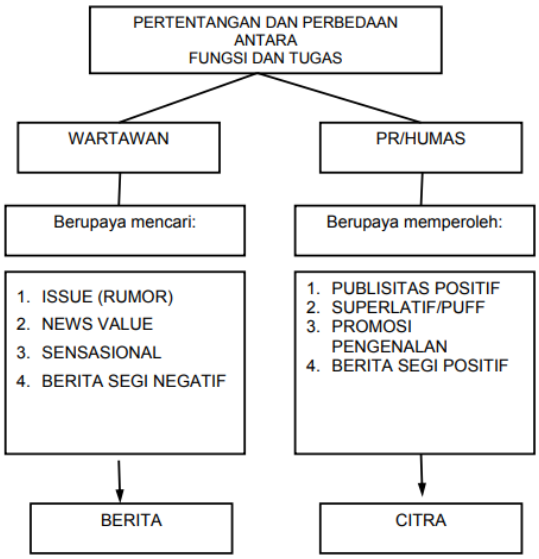
Farah Fadila Arinalhaq

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara humas dan wartawan seringkali dianalogikan sebagai ikatan benci-cinta atau *love-hate relationship*, dimana keduanya saling membutuhkan, namun dibatasi oleh perbedaan kepentingan. Setiap profesi memiliki kultur yang berbeda, sebagaimana dipengaruhi oleh nilai dan norma yang ditetapkan dalam organisasi, prosedur operasional standar, dan kode etik sesuai dengan bidang kerja (Badri, 2016). Pada gilirannya, eksistensi perbedaan peran tersebut dapat memunculkan dilema etis yang kontradiktif antara wartawan yang mementingkan berita dan humas yang memprioritaskan citra. Secara teoritis, wartawan mengemban tanggung jawab mencari informasi yang melayani kepentingan publik (*public interest).* Namun, dalam praktiknya, tuntutan untuk menghasilkan liputan yang memiliki nilai berita dan menarik atensi publik seringkali mendorong wartawan hingga beralih menyajikan berita negatif dengan rumor, sensasi, dan hoax.



Gambar 1.1 Perbedaan Humas dan Wartawan

Sumber: (Ruslan, 1999)

Secara berlawanan, humas merepresentasikan kepentingan organisasi dengan pesan positif berupa publisitas yang didapatkan melalui kegiatan menjalin hubungan media. Ruslan (2003) menggambarkan *media relations* sebagai kegiatan humas yang berorientasi untuk memperoleh publisitas dan menciptakan citra positif di mata khalayak mengenai

publikasi kegiatan lembaga, perusahaan, atau institusi oleh media massa. Hubungan media yang baik penting bagi humas untuk mengamankan eksposur positif mengenai organisasi. Namun, hal tersebut tidak menghapuskan kemungkinan organisasi akan terlibat dalam pemberitaan keliru yang merugikan

Chatra & Nasrullah (2008) mengungkapkan bahwa, berita negatif dapat dikategorikan dalam krisis yang tidak hanya berimbas pada kinerja, lembaga, dan kepercayaan, tetapi juga diperkirakan menyebabkan kerugian fisik yang menghambat sistem internal organisasi. Mengelola krisis yang berkaitan dengan wartawan menjadi tugas humas untuk menyelamatkan citra dan reputasi organisasi dengan mengoptimalkan kemampuan *media relations.* Fahruddin (2023) misalnya, menemukan bahwa Divisi Humas Setda Kota Bekasi mengelola pemberitaan negatif dengan mengupayakan Hak Jawab dan merilis siaran pers. Kemampuan menggunakan Hak Jawab tersebut tidak terlepas dari pengaruh pengetahuan regulasi media yang dimiliki praktisi humas.

Abramson (Rianto, 2024), mengemukakan definisi regulasi media bersumber atau turunan dari kebijakan media, sebagai alat kebijakan; sehingga regulasi media merupakan perangkat untuk memantau, mengendalikan, atau mewatasi praktik para pelaku non-negara. Regulasi media sederhananya juga dapat diartikan sebagai sekumpulan produk dari kebijakan yang mengikat sistem dan operasionalisasi media di suatu wilayah. Salah satu kebijakan media yang menjadi pengetahuan mendasar bagi praktisi humas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini mengkaji implementasi hak jawab ataupun hak koreksi sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa pemberitaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hak jawab maupun hak koreksi berfungsi untuk menjamin keberimbangan berita dan upaya pemulihan nama baik pihak yang dirugikan akibat pemberitaan.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman humas mengenai konsekuensi hukum dari praktik komunikasi mereka, dapat menghadirkan tanggung jawab hukum dan keuangan yang signifikan baik bagi humas maupun organisasi atau klien yang diwakilkan (Caldwell, 2022). Pengetahuan humas yang rendah dalam menangani sengketa pemberitaan kerap bersambung hingga memunculkan sikap antipati pers terhadap organisasi (Badri, 2016). Hal tersebut dapat dicegah apabila humas memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi media, yang memungkinkan humas mengelola sengketa pemberitaan, tanpa merusak hubungan media yang telah terjalin.

Dalam studi *public relations,* terminologi "Hubungan Baik" mencakup makna positif yang luas, meliputi tindakan yang menggembirakan, niat baik, sikap toleransi, sikap timbal balik dalam memahami, mempercayai, menghormati, dan citra yang baik (Nurjanah et al., 2015). Namun, interpretasi censitderung terbatas pada sudut pandang humas saja dan kurang mempertimbangkan perspektif wartawan. Sejalan dengan penelitian Maharani (2013) yang menyebutkan bahwa 67% wartawan menganggap hubungannya dengan humas adalah buruk, sebaliknya 90% humas memandang hubungannya dengan wartawan adalah baik. Perbedaan persepsi tersebut dapat menimbulkan potensi berkembangnya ketegangan di antara keduanya.

Konflik antara humas dan wartawan telah berlangsung sejak lama. DeLorme dan Fedler (Cutlip et al., 2006) menyatakan bahwa, wartawan cenderung menyukai informasi yang mudah diperoleh, tetapi membenci orang yang menyajikannya. Wartawan bergantung pada humas sebagai penyedia sumber informasi untuk diberitakan kepada khalayak media. Bahkan, sejumlah 40% - 50% atau lebih dari seluruh pemberitaan yang setiap hari diliput, bersumber dari divisi hubungan masyarakat baik dari sektor pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba (Parsons, 2007). Sejalan dengan Prastya (2017) yang menemukan bahwa wartawan secara rutin mengakses situs web resmi lembaga pendidikan untuk memperoleh konten aktual terkait kegiatan akademik, capaian institusi, program inovatif, layanan sosial, atau regulasi baru, sebagai informasi yang akan dikembangkan menjadi materi liputan.

Problematika yang kemudian hadir adalah bahwa pemberitaan tersebut tidak selalu akan terus sesuai dengan apa yang diberikan oleh humas atau yang tertera, hingga kerap menimbulkan sengketa pemberitaan. Dalam acara Workshop Peliputan Pemilu yang diselenggarakan pada 21 Juli 2023, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana menuturkan bahwa pada laporan mengenai sengketa pers terbaru terdapat sejumlah 434 kasus yang beragam jenisnya. Dari total pengaduan tersebut, media online mendominasi hingga 97% dari seluruh jumlah kasus mulai dari pelanggaran kode etik, berita tanpa verifikasi, hingga eksploitasi terhadap pejabat publik (Saputra, 2023).



Gambar 1.2 Data Kasus Sengketa Pers

Sumber: Dewan Pers (2021), Dewan Pers (2023)

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan tahunan Dewan Pers mengenai pengaduan kasus sengketa pers di Indonesia menggambarkan fluktuasi jumlah kasus. Sengketa pemberitaan dapat terjadi di berbagai bidang hubungan masyarakat, termasuk institusi pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai Kota Pelajar, memiliki banyak institusi pendidikan baik negeri maupun swasta. Mengacu data dari buku *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Angka 2023* yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 tercatat 126 perguruan tinggi, dimana 109 di bawah naungan Kemendikbudristek dan 17 di bawah naungan Kementerian Agama (Rosliana & Jalil, 2023). Melihat jumlah tersebut, mempertahankan citra positif sebagai kota pelajar memerlukan peran aktif humas di lembaga pendidikan sebagai sumber informasi yang kredibel bagi media dan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat kritik mengenai praktik humas di perguruan tinggi yang cenderung terbuka hanya untuk informasi mengenai prestasi, tetapi jarang memberikan klarifikasi mengenai isu yang menerpa lembaga (Nurjanah et al., 2015). Namun, beberapa humas perguruan tinggi telah menggunakan Hak Jawab untuk mengklarifikasi pemberitaan yang keliru. Universitas Bojonegoro (Unigoro) merespons melalui surat hak jawab yang berisi klarifikasi atas pemberitaan yang bertajuk *"Mahasiswa Semester 3 Sesalkan sikap Sang Dekan Fakultas Pertanian"* oleh Jejak KasusTV pada Senin, 7 Februari 2022. Hak jawab dimuat kembali dalam berita yang bertajuk *"Hak Jawab dan Klarifikasi Humas Universitas Bojonegoro atas Pemberitaan Media"* oleh Jejak KasusTV pada Rabu, 09

Februari 2022. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merespons atas berita tanpa konfirmasi dengan Hak jawab dimuat oleh Suara Nasional pada Jumat, 6 Maret 2020 dalam berita yang bertajuk *"Hak Jawab UMY Terkait Publikasi Surat Keputusan Senat Fisipol UMY".* Pada kasus yang sama, UGM juga menyampaikan klarifikasi yang diunggah oleh Harian Jogja pada Rabu, 26 Juni 2019 dengan tajuk *"Hak Jawab UGM atas Pemberitaan Harian Jogja"*

Media relations dan penanganan konflik antara humas dengan wartawan telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak peneliti. Fahruddin (2023), misalnya, mengkaji efektivitas komunikasi organisasi dalam penyelesaian hak jawab di humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Selain itu, Oktavia et al. (2020) meneliti strategi humas perusahaan dalam menangani pemberitaan negatif. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang studi regulasi media yang dikaitkan dengan kajian *public relations.* Penelitian yang bertajuk **"Pengaruh Pengetahuan Regulasi Media terhadap Kemampuan *Media relations* di Humas Perguruan Tinggi"** menjadi aspek yang belum banyak dikaji secara mendalam pada penelitian-penelitian sebelumnya. Lebih lanjut, studi yang menghubungkan pemahaman hukum dan praktik *media relations,* memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami dinamika interaksi antara humas dan wartawan.

B. Rumusan Masalah

Perbedaan budaya profesi dapat memicu timbulnya beragam polemik, termasuk pelanggaran hukum oleh humas dan sengketa pemberitaan oleh Pers. Oleh karena itu, pengetahuan regulasi media berperan bagi humas untuk mengelola *media relations* di tengah perbedaan kepentingan atau *conflict of interest* yang kuat. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu "Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations* di humas perguruan tinggi?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menetapkan tujuan yaitu: "Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations* di humas perguruan tinggi"

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *media relations* khususnya humas di institusi pendidikan dan dapat berguna bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan peningkatan standar dan pelatihan kompetensi humas dalam konteks regulasi media. Dapat dipahami bahwa pengetahuan regulasi media yang dimiliki humas akan berimplikasi pada kemampuannya dalam mengelola *media relations*. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Komunikasi mengenai *media relations* dalam konteks humas institusi pendidikan, dengan upaya mengisi celah literatur akademik mengenai pengaruh regulasi media terhadap kemampuan *media relations.*
b. Temuan penelitian diharapkan dapat menyumbang dalam pengembangan konsep dan model teoritis baru *media relations* melalui elaborasi dengan aspek regulasi media.
c. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan membuka peluang baru bagi peneliti di bidang *Public Relations* untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai regulasi media ataupun *media relations.*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat berguna sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan mengenai peningkatan standar dan pelatihan kompetensi humas di perguruan tinggi, khususnya terkait pengetahuan regulasi media dan kemampuan *media relations.*
b. Bagi praktisi humas, diharapkan dapat membantu evaluasi dan pengembangan kompetensi *media relations*. Selain itu dapat meningkatkan pemahaman pentingnya mengetahui regulasi media sebagai pedoman menjalin hubungan media yang saling menguntungkan.
c. Bagi Perhumas, diharapkan dapat merumuskan standar sertifikasi profesi humas pengetahuan regulasi media sebagai kompetensi dasar yang wajib dimiliki praktisi humas di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting dalam melandasi penelitian ini, melalui tinjauan pada penelitian sebelumnya membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi media dan *media relations.* Selain itu, tinjauan ini membantu dalam mengidentifikasi celah pengetahuan yang akan memperkuat orisinalitas penelitian yang dilakukan. Kesadaran yang semakin meningkat mengenai pentingnya kemampuan membangun *media relations*, telah menarik perhatian para akademisi untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap dinamika di antara humas dan wartawan.

Penelitian yang mengeksplorasi mengenai pemanfaatan situs web resmi institusi pendidikan oleh wartawan media cetak lokal DIY sebagai sumber berita dengan menggunakan deskriptif kualitatif (Prastya, 2017). Aktivitas *media relations* di Humas Universitas Teknologi Sumbawa dengan menggunakan metode kualitatif (Rosalina & Anshori, 2023). Strategi hubungan media di bidang humas dan protokoler UAD dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (Farihanto, 2014). Praktik budaya amplop pada *media relations* institusi pendidikan di Yogyakarta dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif (Nurjanah et al., 2015). Studi yang mengkaji pengaruh media sosial Instagram BEMP Humas dalam menambah minat mahasiswa berorganisasi dengan menerapkan metode deskriptif kuantitatif (Puspita Sari et al., 2024). Penelitian yang mengeksplorasi pengaruh *cyber public relations* terhadap citra perguruan tinggi swasta di Provinsi Riau dengan menerapkan metode kuantitatif (Yazid et al., 2022). Serta studi yang membahas perbedaan persepsi wartawan dan humas terhadap nilai berita dengan menerapkan metode kuantitatif survey (Maharani, 2013).

Suherman et al. (2023) melakukan studi yang mengkaji strategi *media relations* Humas Polres Baubau dengan menggunakan pendekatan *media relations* yang dikembangkan Yosal Iriantara yaitu mengelola relasi, mengembangkan strategi, dan mengembangkan jaringan. Melalui hasil wawancara dan observasi, disebutkan bahwa humas Polres Baubau telah menerapkan ketiga strategi yang dijelaskan oleh Yosal Iriantara. Selain itu, ia menemukan keluhan dari insan media Kompas TV yang menyatakan ketidakpuasan terkait kurang terbukanya akses informasi serta minimnya transparansi yang diberikan tim humas terkait peristiwa-peristiwa yang diungkap oleh Polres Baubau. Temuan tersebut relevan dengan latar belakang penelitian ini mengenai hadirnya kritik insan media kepada

humas perguruan tinggi yang hanya terbuka pada berita yang bersifat prestasi saja. Kecenderungan humas perguruan tinggi yang tertutup ketika terjadi konflik dan jarang memberikan klarifikasi apabila terjadi krisis yang menerpa lembaga.

Sejalan dengan Badri (2016) yang mengkaji pengelolaan konflik akibat perbedaan budaya profesi antara wartawan dan humas, menemukan bahwa konflik bersumber dari konflik kepentingan. Masalah yang paling umum dalam sengketa pers adalah kesalahan dalam pemberitaan. Ia juga menekankan bahwa, pentingnya pengetahuan tentang penyelesaian sengketa pers untuk menghindari sikap antipati dari insan pers terhadap humas atau organisasi terkait. Ia menemukan bahwa langkah awal dalam penyelesaian sengketa Pers adalah dengan mengajukan hak jawab atau hak koreksi ke media terkait. Jika permohonan tersebut diabaikan, mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan jalur terbaik untuk menjaga hubungan yang telah terjalin dengan media.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, peneliti dapat mengidentifikasi adanya hubungan dan merumuskan variabel-variabel penelitian untuk studi yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Regulasi Media terhadap Kemampuan *Media relations* di Humas Perguruan Tinggi". Temuan dari Suherman et al. (2023) mendorong peneliti untuk menetapkan Kemampuan *Media relations* sebagai variabel terikat, karena adanya faktor pengaruh, yaitu pengetahuan tentang penyelesaian sengketa pers yang mempengaruhi efektivitas humas dalam mengelola konflik perbedaan budaya profesi sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Badri (2016). Oleh karena itu, Pengetahuan Regulasi Media ditetapkan sebagai variabel bebas, dengan fokus pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dari sekian banyak penelitian yang telah dipaparkan, sejauh ini masih jarang studi yang secara mendalam mengkaji hubungan *media relations* dan pengetahuan regulasi media, terutama pada humas perguruan tinggi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti strategi dan aktivitas *media relations* seperti *press release, press conference, press tour, press gathering,* dan *press briefing*. Namun, belum banyak yang membahas pentingnya pengetahuan regulasi media dalam mengelola konflik dan relasi dengan wartawan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara kuantitatif pengaruh pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations* di humas perguruan tinggi.

2. Tinjauan Teoritis

a. *Media relations*

Media relations merupakan elemen krusial dalam efektivitas kegiatan dan fungsi kehumasan yang melibatkan media sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan suatu organisasi dengan khalayaknya. Jefkins (2004) menjelaskan *media relations* sebagai upaya memperoleh publikasi atau penyiaran yang optimal atas suatu pesan atau informasi Humas, dengan tujuan membangun pengetahuan dan pemahaman di kalangan khalayak terkait organisasi atau perusahaan. Lesly (1992) menjelaskan *media relations* sebagai cara berhubungan dengan sarana komunikasi yaitu media yang bertujuan untuk mengerjakan publisitas atau menanggapi kepentingan media terhadap organisasi. Iriantara (2005) memperkaya pengertian *media relations* sebagai unsur dari *public relations external* yang berupaya membangun dan meluaskan hubungan baik dengan media massa sebagai instrumen komunikasi yang menjembatani organisasi dan publik untuk menggapai tujuan organisasi.

Hubungan media juga mencakup upaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktisi Humas dan wartawan dalam mengaktualisasikan konsep *public to be informed.* Selain itu, hubungan media merupakan hubungan yang saling berbalas antara organisasi dengan pers, yang didalamnya memuat hubungan antara divisi Humas dengan jajaran redaksional mulai dari wartawan, redaktur, ketua redaksi, hingga pemilik media yang bertujuan mengupayakan seluruh penyiaran mengenai organisasi dapat disiarkan melalui media massa (Sambo, 2019). Dapat disimpulkan bahwa *media relations* merupakan upaya praktisi Humas dalam menjalin hubungan positif dengan wartawan (Pers) untuk memperoleh publisitas, sikap pengertian, dukungan, dalam membangun citra dan reputasi organisasi yang positif.

Tujuan operasionalisasi *media relations* mencakup seluruh kepentingan organisasi yang berhubungan dengan publik. Mengacu gagasan Rachmadi (Wardani, 2008) bahwa tujuan *media relations* yaitu sebagai berikut:

1) Meraih Publisitas

   Organisasi membutuhkan media dalam mengkomunikasikan secara luas dan optimal mengenai perkembangan seperti aktivitas dan upaya organisasi yang positif.

Publisitas oleh media massa memiliki peranan yang penting dalam menambah dan mengangkat citra maupun reputasi organisasi agar selalu baik di mata publik

2) Mengamankan Tempat

   Media relations berguna bagi organisasi untuk mendapatkan posisi dalam penyiaran media yang bermanfaat melalui porsi pemberitaan yang objektif, lumrah, dan berimbang.

3) Mendapatkan *Feedback*

   Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan organisasi, sangat penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana atribusi publik dalam memandang sikap ataupun aktivitas yang telah dilakukan

4) Kelengkapan Data

   Tanggapan yang diberikan publik dapat membantu pimpinan organisasi dalam memenuhi data atau informasi yang berguna untuk kegiatan evaluasi. Organisasi akan mempertimbangkan respons publik untuk menetapkan sikap, tindakan, ataupun kebijakan yang dapat berpengaruh pada kesuksesan organisasi.

5) Hubungan yang Positif

   Media relations bertujuan untuk menciptakan hubungan yang kokoh, serasi, dan berkesinambungan dengan dasar saling percaya dan menghargai antara organisasi, pers, dan khalayak

Dalam memaksimalkan efektivitas hubungan media, Iriantara (2005) menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam mengelola relasi. Fokus utama dalam terletak pada upaya membangun hubungan yang solid, tidak hanya dengan wartawan secara individual, tetapi juga dengan media massa sebagai institusi secara keseluruhan. Komunikasi intensif antara Humas dan wartawan merupakan elemen yang penting dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dan tugas utama masing-masing pihak. Pembentukan tim media internal dalam organisasi yang terdiri dari koordinator media, penulis, dan juru bicara, menjadi aspek penting dalam memastikan pengelolaan informasi dilakukan secara efisien dan konsisten. Menyediakan daftar kontak yang dapat dihubungi oleh media massa ketika membutuhkan informasi atau memverifikasi informasi menjadi faktor krusial dalam memfasilitasi komunikasi yang responsif. Selain itu, membangun hubungan interpersonal yang kuat juga menjadi fokus pendekatan dalam mengelola relasi.

Iriantara (2005) menekankan pada pendekatan mengembangkan strategi untuk memelihara citra positif organisasi dan hubungan media yang baik. Pendekatan ini berfokus pada upaya mengembangkan materi PR yang dibutuhkan media massa secara konsisten. Organisasi perlu memposisikan sebagai sumber informasi yang terpercaya, kredibel, dan berharga untuk media massa. Pendekatan tersebut juga menekankan pentingnya menempatkan pimpinan organisasi sebagai juru bicara, ketua dalam asosiasi profesi, atau asosiasi perusahaan sejenis. Untuk memastikan akurasi dan aktualitas informasi yang disampaikan, Humas harus selalu berkoordinasi dengan departemen lain dalam organisasi. Memahami tenggat waktu media massa dengan memberikan informasi yang tepat waktu, untuk membangun reputasi organisasi sebagai sumber yang dapat diandalkan dan responsif terhadap kebutuhan media. Organisasi harus berkomitmen untuk tidak pernah memberikan informasi yang tidak benar kepada media massa, dan menghindari konflik yang tidak diperlukan.

Pendekatan selanjutnya adalah mengembangkan jaringan, yang mana Iriantara (2005) membahas pentingnya menciptakan dan memelihara koneksi yang bermakna di lingkungan profesional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjadi anggota atau menjalin kontak dengan organisasi profesi yang relevan. Selain itu, tidak hanya terbatas pada satu organisasi profesi serupa, tetapi juga menjalin kontak dengan organisasi profesi lainnya untuk memperluas cakupan jaringan.

b. Regulasi Media

Regulasi menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024) memiliki arti berupa pengaturan. Regulasi juga dijelaskan sebagai bentuk program pengaturan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan memperoleh hasil atau dampak tertentu, sedangkan regulasi media pada hakikatnya dilakukan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam memperoleh konten media yang berkualitas dan aksesibilitas yang memadai (Rianto, 2019). Lebih lanjut, Rianto (2024) menjelaskan bahwa regulasi komunikasi mencakup pengaturan terhadap hubungan manusia dimediasikan oleh berbagai jenis media yang berbeda. Khusna & Susilowati (2015) menjelaskan bahwa regulasi media berupa serangkaian peraturan dan kebijakan yang mengatur interaksi dan operasionalisasi aktivitas media massa dan teknologi media.

Dalam konteks negara-negara demokratis, penting untuk mengetahui pengaturan mengenai media yang mana menduduki posisi yang penting untuk menjaga keseimbangan

antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Nwosu (2003) menyebutkan bahwa dalam lingkup pemerintahan demokratis, semua negara menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam konstitusi mereka. Nigeria mengatur hal tersebut dalam Konstitusi 1979 dan 1999. Di sisi lain Amerika Serikat dalam Amandemen Pertama tahun 1788 yang menegaskan bahwa tidak ada undang-undang yang boleh membatasi kebebasan bicara atau pers. Nwosu (2003) juga menerangkan bahwa pengaturan media di seluruh dunia biasanya diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yang mana tingkat kontrol di setiap negara disesuaikan dengan lingkungan politik masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Pengaturan mandiri atau *Self-regulatory measures*

   Pengaturan mandiri meliputi kode etik resmi atau pedoman perilaku etis yang ditetapkan di banyak negara untuk membantu profesional media dalam membuat keputusan yang etis. Sebagai contoh, di Nigeria memiliki kode seperti Kode Praktik Periklanan Nigeria (The Nigerian Code of Advertising Practice), Institut Hubungan Masyarakat Nigeria (Nigerian Institute of Public Relations), Kode Etik Dewan Pers Nigeria (Code of Ethics, and Nigerian Press Organization Code of conduct). Di negara-negara maju, sejumlah organisasi media mengoptimalkan Ombudsman yaitu profesional internal yang memiliki tugas menilai konflik antara masyarakat dan organisasi. Beberapa organisasi juga membentuk kelompok kecil yang terdiri dari masyarakat dan media untuk meninjau keluhan publik terhadap media dan mempublikasikan hasilnya.

   Mekanisme etika normatif menjadi bentuk pengaturan mandiri yang dirancang untuk menghindari regulasi pemerintah yang lebih ketat atau mengganggu. Sejalan dengan Ruth (2000) yang menjelaskan bahwa, di Inggris juga menerapkan *self-regulatory*, dimana tidak terdapat organisasi seperti Dewan Pers, badan pengaduan yang ditetapkan oleh undang-undang, atau bahkan tidak terdapat aturan yang mengharuskan wartawan terdaftar menjadi anggota dari salah satu asosiasi wartawan. Namun secara sadar, para praktisi media menciptakan Komisi Pengaduan Pers atau *Press Complaints Commission*

2) Pengaturan Eksternal atau External-Regulation

   Pengaturan eksternal merupakan pengendalian yang dijalankan oleh pemerintah melalui undang-undang dan regulasi legislatif. Pemerintah menciptakan badan khusus untuk memberikan lisensi serta menerapkan pedoman operasional bagi organisasi media. Pada tahun 1992, Nigeria membentuk Komisi Penyiaran Nasional

atau National Broadcasting Commission (NBC). Amerika serikat memiliki Komisi Komunikasi Federal atau Federal Communication Commission yang dibentuk pada tahun 1914.

Setelah memperoleh gambaran pengaturan media di beberapa negara demokratis, perlu untuk mengetahui beberapa regulasi media yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, merupakan regulasi yang mengatur media cetak berupa perusahaan media, Dewan Pers, organisasi media, media nasional, media asing sensor, pembatasan penerbitan, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, kewajiban koreksi, dan kode etik jurnalistik
2) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, merupakan regulasi yang mengatur media elektronik televisi, radio, siaran iklan (komersial maupun layanan masyarakat), penggunaan spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, izin penyelenggaraan penyiaran, serta sistem penyiaran nasional
3) UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang mengatur aktivitas perfilman, industri perfilman, produksi film, peredaran film, sensor film, insan film, pertunjukkan film
4) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur informasi publik, badan publik, pengguna informasi publik, pemohon informasi publik, komisi informasi, sengketa informasi publik, mediasi, ajudikasi, pejabat publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
5) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, informasi elektronik, transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual, jaringan sistem elektronik, tanda tangan elektronik
6) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang mengatur alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, orbit satelit, pengamanan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, interkoneksi

Regulasi media yang mengatur kehidupan Pers di Indonesia adalah UU. No 40 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini, pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang berperan dalam menjalankan berbagai kegiatan jurnalistik. Kegiatan

ini meliputi pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk, termasuk teks, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan menggunakan media cetak, elektronik, dan berbagai saluran komunikasi yang tersedia (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999).

Buku "*1001 Alasan UU Pers Lex Specialis",* menjelaskan bahwa UU Pers bersifat *lex specialis,* yang berarti undang-undang ini secara khusus dirancang untuk mengatur masalah yang timbul dari peran dan fungsi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik (Panjaitan & Siregar, 2004). Dengan begitu, setiap permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik seperti pemberitaan atau publisitas yang menyimpang dapat diselesaikan melalui hak masyarakat sebagai pembaca. Meliputi Hak Jawab yaitu hak individu atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau bantahan terhadap pemberitaan yang memuat fakta yang merugikan nama baik mereka. Selain itu, Hak koreksi yaitu hak untuk memperbaiki atau membetulkan informasi yang keliru yang telah diberitakan oleh pers, baik mengenai diri sendiri maupun orang lain (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999).

c. *Media Relations* dan Regulasi Media

Media relations merupakan aspek fundamental dalam praktik kehumasan, yang mana tidak hanya terbatas pada pembinaan hubungan baik dengan media, tetapi juga pemahaman mendalam tentang aturan main yang mengatur interaksi humas dan media. Kompleksitas hubungan keduanya semakin terlihat jelas ketika organisasi menghadapi situasi krisis. Iriantara (2005) mengklasifikasikan tiga jenis krisis yang paling lazim terjadi di lingkungan bisnis: krisis finansial yang berkaitan dengan likuiditas atau kebangkrutan, krisis PR yang berhubungan dengan publisitas negatif yang mana dapat mengancam kesuksesan organisasi, dan krisis strategis yang muncul akibat perubahan pada lingkungan bisnis.

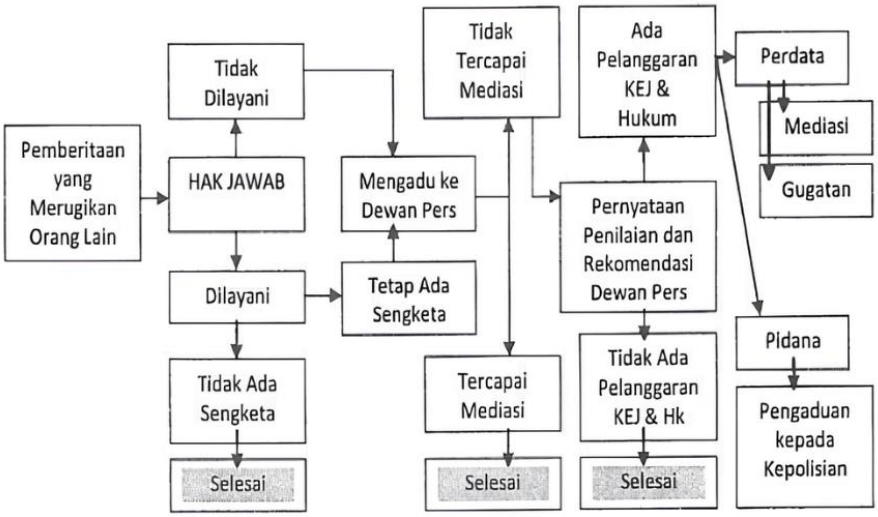
Dari ketiga jenis krisis, penelitian ini secara khusus menyoroti fenomena krisis PR yang terjadi di perguruan tinggi. Kegagalan dalam mengelola penyebaran informasi mengenai krisis yang terjadi, dapat mengakibatkan dampak yang serius pada citra dan reputasi institusi. Hal tersebut tidak hanya memicu timbulnya persepsi negatif di kalangan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak hubungan yang telah terjalin dengan media. Penanganan publisitas negatif menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi humas. Girsang (Badri, 2016) membahas mengenai penyelesaian konflik antara humas dan wartawan melalui

jalur hukum, seperti sengketa pers yang diselesaikan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) seringkali menuai kecaman dari insan pers. Pendekatan semacam ini dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pers, yang berdampak pada rusaknya hubungan jangka panjang organisasi dan media. Berdasarkan pemahaman tersebut, menjadi jelas bahwa setiap pendekatan yang dipilih oleh humas dalam mengelola pemberitaan negatif memiliki implikasi signifikan terhadap keberlangsungan hubungan organisasi dengan media. Pilihan pendekatan, baik melalui hubungan interpersonal, prosedur Dewan Pers, keterlibatan kepolisian, atau bahkan proses pengadilan, sangat bergantung pada tingkat pemahaman humas terhadap regulasi media yang berlaku.

Sebagai contoh penyelesaian sengketa pers terdapat studi yang dilakukan oleh Fahruddin (2023) meneliti kasus pemberitaan media yang membutuhkan klarifikasi karena dinilai tidak akurat dan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi, yang berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengambil langkah-langkah untuk mengelolaa isu publik dengan menyampaikan hak jawab dan siaran pers. Tujuannya untuk memperbaiki informasi yang salah dan memastikan adanya keberimbangan dalam berita. Proses penyelesaian hak jawab yang dilakukan oleh humas dimulai dengan mengidentifikasi berita yang mengandung informasi keliru, diikuti dengan pengumpulan berita dalam klip untuk didokumentasikan. Selanjutnya, humas berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun hak jawab. Setelah informasi sudah terpenuhi, humas merancang hak jawab dan menyampaikannya kepada redaksi media untuk dipublikasikan.

Selain itu, terdapat kasus yang melibatkan media online Zonalinenews menyoroti dugaan pencemaran nama baik dan pemfitnahan terhadap Polres Rote Ndao mengenai berita tanpa konfirmasi yang berjudul ”Dalmas Polres Rote Ndao Diduga Angkut BBM Bersubsidi ke Gudang Pengusaha”. Oba et al. (2023) menjelaskan bahwa Polres Rote Ndao merespons dengan mengirimkan klarifikasi melalui surat hak jawab, hak koreksi, dan protes melalui email kepada redaksi Zonalinenews. Pada tanggal yang sama, 20 Juni 2017, Zonalinenews mengunggah klarifikasi dalam berita yang bertajuk ” Polres Rote Ndao Klarifikasi Berita Soal Dalmas Angkut BBM”. Namun, setelah upaya tersebut selesai, Zonalinenews kembali menerbitkan berita baru yang bertajuk ” Oknum Polisi Yang Melakukan Hal Tersebut, Bisa Saja Atas Perintah”

Dalam menyelesaikan sengketa pers ini, Dewan Pers berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang terlibat. Dewan Pers membantu mencapai kesepakatan tanpa menempuh jalur hukum. Proses ini dimulai dengan permintaan dari pihak yang bersengketa agar Dewan Pers bertindak sebagai penengah. Jika kesepakatan tercapai, akan dikeluarkan surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh semua pihak dan Dewan Pers. Oba et al. (2023) mengungkapkan bahwa pada kasus tersebut Dewan Pers menilai bahwa terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 atas ketidakberimbangan dan Pasal 3 tidak melewati uji informasi. Dewan Pers melayangkan sanksi kepada Zonalinenews berupa keharusan wartawan Zonalinenews meralat dan mengoreksi pemberitaan serta mengunggah hak jawab atau hak koreksi di Zonalinenews serta media lainnya. Pada akhirnya, sengketa berhasil mencapai kesepakatan damai dengan syarat Zonalinenews telah melaksanakan sanksi yang diberikan.



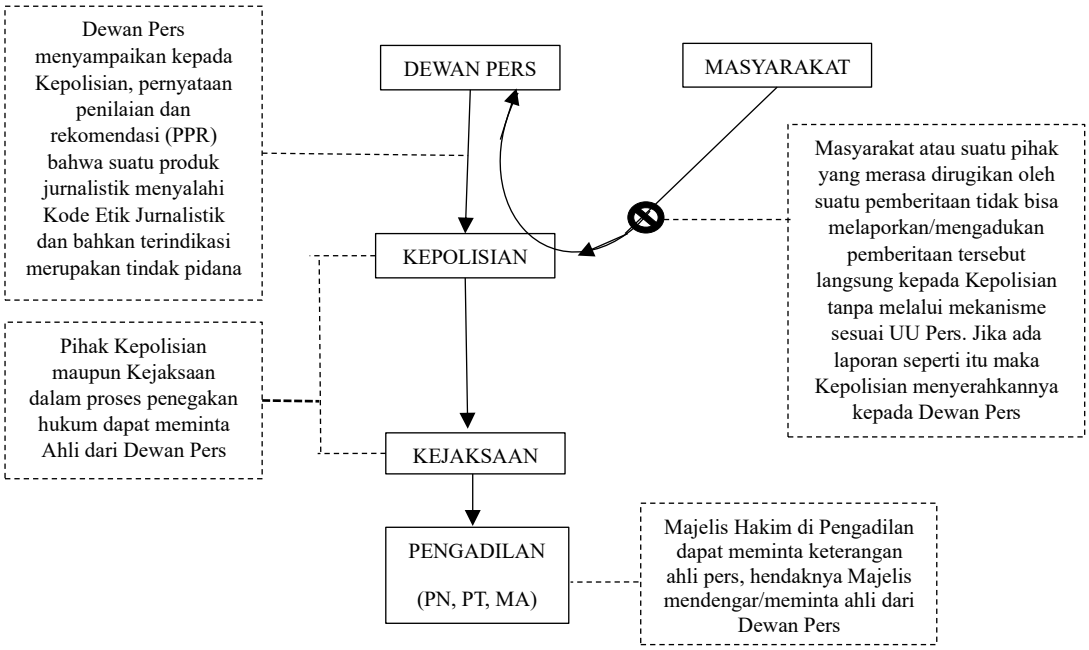
Gambar 1.3 Alur Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Jalur Non-Litigatif

Sumber: (Faisal, 2021)

Gambar di atas menjelaskan alur penyelesaian kasus sengketa pemberitaan tanpa melalui jalur litigatif atau pengadilan. Dapat dilihat bahwa pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dapat mengajukan hak jawab kepada media massa yang menerbitkan berita tersebut. Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa Pers memiliki kewajiban untuk melayani Hak Jawab dan Hak Tolak. Apabila Hak Jawab tidak dipenuhi atau sudah dipenuhi, namun masih terjadi konflik serupa dengan kasus Zonalinenews dan Polres Rote Ndao dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Pers. Tahap selanjutnya, Dewan Pers akan berperan sebagai mediator, apabila proses mediasi tidak

mencapai kesepakatan, maka akan dilangsungkan sidang pleno untuk memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) terhadap karya jurnalistik yang diadukan.

Setelah PPR dikeluarkan, terdapat dua kondisi yaitu jika dinyatakan tidak terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan kepatuhan tata kerja jurnalistik, maka perkara dianggap selesai. Namun, jika penilaian menemukan terdapat pelanggaran, maka rekomendasi diselesaikan melalui jalur perdata atau pidana yang ditindaklanjutkan oleh penegak hukum di ranah litigasi (Faisal, 2021).



Gambar 1.4 Alur Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Jalur Litigatif

Sumber: (Faisal, 2021)

Dijelaskan dalam studinya, bahwa skema di atas digunakan apabila penyelesaian sengketa pers melalui jalur non-litigatif, seperti hak jawab dan Dewan Pers belum berhasil, maka sengketa dapat dilanjutkan ke jalur litigatif, baik ranah perdata maupun pidana. Lebih dalam ia menyoroti penyelesaian melalui jalur pidana, dimana setelah Dewan Pers mengeluarkan Putusan PPR, jika hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik atau indikasi tindak pidana, maka Dewan Pers akan menyerahkan perkara tersebut kepada Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Dalam skema lainnya, apabila pihak yang merasa dirugikan melaporkan langsung sengketa tersebut kepada Kepolisian, maka pihak yang terlibat akan diarahkan untuk mengikuti prosedur penggunaan hak jawab, hak koreksi, serta pengaduan kepada Dewan

Pers, atau proses perdata sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri. Apabila Kepolisian menerima laporan terkait sengketa pemberitaan, mereka tidak dapat langsung melanjutkan laporan tersebut sebagai tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri, menyebutkan bahwa kepolisian harus mengadakan penyelidikan awal dimana hasilnya harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers untuk menetapkan apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Apabila berkas perkara pemberitaan telah lengkap, Kepolisian akan melanjutkan kasus tersebut kepada Kejaksaan. Pada tahap Kejaksaan, Jaksa berhak meminta keterangan dari ahli yang ditunjuk oleh Dewan Pers untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan MoU antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008, bahwa Hakim berhak untuk meminta penjelasan dari ahli di bidang Pers.

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pers dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi yang dapat digunakan seebagai dasar pengetahuan humas dalam mengelola dan menyelesaikan pemberitaan negatif yang menerpa organisasi. Berikut beberapa hal mengenai penyelesaian sengketa yang perlu diketahui oleh humas:

1) Hak Jawab dan Hak Koreksi

   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan hak kepada masyarakat yang dapat digunakan ketika terlibat dalam sengketa pemberitaan. Sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Hak Jawab merujuk pada hak yang dimiliki individu atau kelompok untuk menanggapi atau membantah terhadap pemberitaan yang berisi fakta yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya. Ayat (12) menyebutkan bahwa Hak Koreksi mengacu pada hak yang dimiliki setiap individu untuk memperbaiki atau membetulkan kesalahan informasi yang disampaikan oleh media, baik mengenai diri mereka sendiri maupun orang lain. Kewajiban Pers untuk memenuhi kedua hak tersebut tertuang dalam Bab II Pasal 5 ayat (2) dan (3). Ketentuan pidana tertuang dalam Bab VIII Pasal 18 Ayat (2), disebutkan bahwa jika terjadi pelanggaran pada Pasal 5 ayat (2) dibebankan dengan pidana denda maksimal Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

2) Mediasi Dewan Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur tentang fungsi Dewan Pers yang mana diatur dalam BAB V Pasal 15 ayat 2 poin c, bahwa Dewan Pers memenuhi fungsi memberikan pertimbangan dan berusaha menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus yang berkaitan dengan pemberitaan media. Mekanisme pengaduan ke Dewan Pers dirincikan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa Pengaduan merupakan aktivitas dimana individu, kelompok, lembaga/instansi menyampaikan keberatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karya atau aktivitas jurnalistik kepada Dewan Pers.

Dalam hal ini terdapat pihak Pengadu yang mana dipahami sebagai individu, kelompok, atau lembaga/instansi yang mengajukan keberatan terkait karya atau aktivitas jurnalistik kepada Dewan Pers. Pihak Teradu mengacu pada wartawa, perusahaan media, individu, kelompok, atau lembaga/instansi yang menjadi objek pengaduan. Bab II Pasal 2 ayat (1) mengenai hal yang bisa diadukan berupa karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik. Karya jurnalistik yang lumrah dijumpai dalam kegiatan media relations, seperti publisitas, dapat menjadi subjek pengaduan yang ditangani oleh humas. Khususnya pemberitaan negatif berupa informasi yang keliru, informasi tanpa konfirmasi, kesalahan pengutipan, dan kasus lainnya yang dapat mengancam citra dan reputasi organisasi. Pasal 3 mengatur bahwa karya jurnalistik yang dapat diajukan untuk pengaduan adalah karya yang diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan sebelumnya. Namun, terdapat pengecualian untuk kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum, prasangka atau kebencian mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, serta hal lain yang dipertimbangan oleh Dewan Pers.

Dalam konteks perguruan tinggi yang rentan terhadap krisis PR, pengetahuan regulasi membantu humas untuk mengarahkan situasi sensitif dengan lebih baik, menghindari tindakan yang dapat memperparah krisis atau merusakan hubungan dengan media. Pengetahuan media media tidak hanya melindungi praktisi humas dan organisasi dari potensi konflik hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas humas di mata wartawan dan media, membina hubungan yang lebih konstruktif dan saling menguntungkan. Praktisi

humas dapat menjadi jembatan yang efektif antara organisasi dan media, memfasilitasi komunikasi yang transparan dengan tetap melindungi kepentingan organisasi sesuai dengan hukum. Dengan demikian, pengetahuan regulasi media bukan sekedar aspek tambahan, melainkan komponen fundamental yang secara signifikan meningkatkan kemampuan media relations. Kontribusinya bersifat multidimensi, mencakup aspek strategis dalam perencanaan komunikasi, aspek operasional dalam mengelola krisis, dan aspek etis dalam menjalin hubungan media yang baik dan berkelanjutan

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, peneliti menetapkan jawaban sementara yaitu sebagai berikut:

(Ha) : terdapat pengaruh antara pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations* di Humas perguruan tinggi

(H0) : tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations* di Humas perguruan tinggi

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan upaya peneliti untuk menjelaskan dengan memberikan definisi mendalam secara teoritis pada suatu konsep atau variabel yang akan dikaji dalam penelitian. Berbeda dengan kerangka konseptual yang mengacu pada visualisasi mengenai hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Selain itu pernyataan hubungan antar konsep (*relational statement)* yang dipaparkan dalam kerangka konsep akan menentukan variabel bebas dan variabel terikat, hipotesis, desain penelitian, metode statistik, serta hasil yang diharapkan dari penelitian (Syapitri et al., 2021). Berikut adalah kerangka konseptual yang ditetapkan dalam penelitian ini:



Gambar 1.5 Kerangka Konseptual

Sumber: (Catatan Peneliti, 2024)

Kerangka konseptual dalam gambar 1.5 menunjukkan variabel-variabel yang akan diteliti. Pengetahuan Regulasi Media sebagai variabel X atau variabel bebas, sementara Kemampuan *Media relations* sebagai variabel Y atau variabel terikat. Penelitian ini akan menguji apakah variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebagaimana yang digambarkan dalam kerangka konseptual di atas. Untuk memperjelas penjelasan variabel-variabel yang diukur, berikut adalah definisi konseptual yang telah dirumuskan

a. Variabel Independen (X) : Pengetahuan Regulasi Media

Pengetahuan dipahami sebagai keseluruhan dari apa yang diketahui oleh individu mengenai suatu objek baik suatu hal maupun pengalaman individu. Sebagai produk dari aktivitas memahami, pengetahuan merupakan kekayaan mental yang disimpan dalam pikiran dan hati manusia (Octaviana & Ramadhani, 2021). Kegiatan mengetahui selalu berkaitan dengan dua entitas utama yaitu subjek yang memahami (S) dan suatu yang dipahami atau objek pengetahuan (O), secara fenomenologis kedua hal tersebut bersifat inheren atau tidak dapat dipisahkan (Darsini et al., 2019).

Penelitian ini mengukur variabel pengetahuan dengan memanfaatkan konsep pengetahuan yaitu taksonomi bloom yang digagas oleh seorang psikolog pendidikan Benjamin Bloom. Konsep tersebut memuat susunan hierarki untuk menentukan keterampilan berpikir mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi (Ulfah & Arifudin, 2023). Konsep yang digagas oleh psikolog pendidikan Benjamin S. Bloom pada 1956, pada awalnya memiliki dua area utama pembelajaran yaitu kognitif dan afektif yang diperkenalkan melalui karyanya "*Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals"*. Pada tahun 1966, Elizabeth Simpson melengkapi teori tersebut dengan menyumbang ranah psikomotorik yang diperkenalkan melalui karyanya "The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain".

Lebih lanjut untuk memahami tiga domain tersebut Gunawan & Palupi (2012) menjelaskan ranah kognitif sebagai area berhubungan dengan tujuan belajar yang mana mengacu pada keterampilan berpikir. Ranah afektif yang mencakup dimensi emosional, seperti perasaan, emosi, nilai, dan sikap hati. Ranah psikomotor yang berfokus pada keterampilan fisik dan fungsi otot kerangka. Seiring perkembangan pembelajaran yang terjadi pada tahun 2001, David R. Krathwohl bersama Lorin W. Anderson, menyempurnakan konsep taksonomi Bloom pada ranah kognitif untuk mempertahankan agar tetap relevan

dengan perkembangan zaman. Salah satu perubahannya adalah dengan menitikberatkan pada perubahan terminologi dari kata benda menjadi kata kerja.

Tabel 1.1
Revisi Taksonomi Bloom Domain Kognitif

	Taksonomi Bloom Lama	Taksonomi Bloom Baru
C1	Pengetahuan	Mengingat
C2	Pemahaman	Memahami
C3	Aplikasi	Mengaplikasikan
C4	Analisis	Menganalisis
C5	Sintesis	Mengevaluasi
C6	Evaluasi	Mencipta

Sumber: Anderson et al. (2001)

Penelitian ini menetapkan versi revisi Taksonomi Bloom, karena kerangkanya lebih terstruktur, memungkinkan pengukuran aspek kemampuan kognitif secara lebih komprehensif melalui penggunaan kata kerja. Berikut penjelasan mengenai klasifikasi kategori dalam ranah kognitif Taksonomi setelah revisi Anderson dan Krathwohl yaitu sebagai berikut (Gunawan & Palupi, 2012):

1. C.1 mengingat (*remember)*

   Mengingat merupakan kemampuan untuk mengambil kembali informasi yang telah tersimpan dalam memori, baik yang baru dipelajari maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat, menjadi dimensi yang penting dalam pembelajaran yang bermakna dan penyelesaian masalah, karena menjadi dasar untuk pemikiran yang lebih kompleks. Dua kegiatan utama dalam mengingat yaitu mengenali (*recognition)* berkaitan dengan identifikasi informasi spesifik dan memanggil kembali (*recalling)* berkaitan dengan mengambil informasi secara cepat dan akurat
2. C.2 memahami (*understand)*

   Memahami merupakan proses yang melibatkan pembentukan makna dari berbagai informasi yang diperoleh. Dua kegiatan utama dalam memahami yaitu, mengklasifikasikan (*classification)* berkaitan dengan proses mengenali suatu objek atau informasi termasuk dalam kategori tertentu. Kemudian, membandingkan (*comparing)* yang berkaitan dengan proses mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek.
3. C.3 mengaplikasikan (*apply)*

   Mengaplikasikan merupakan proses yang merujuk pada penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang atau melakukan suatu percobaan. Dua kegiatan

utama dalam mengaplikasikan yaitu kegiatan melaksanakan prosedur *(executing),* dimana informasi yang sudah dimiliki digunakan untuk menetapkan prosedur yang tepat dalam menyelesaikan masalah familiar dan melakukan percobaan. Sementara mengimplementasikan *(implementing),* mengacu pada memilih dan menggunakan prosedur untuk situasi yang tidak familiar, dengan mengenali dan memahami masalah terlebih dahulu.

4. C.4 menganalisis (*analyze)*

   Menganalisis merupakan proses memecah masalah menjadi bagian-bagian dan mempelajari hubungan antar bagian masalah tersebut untuk mengetahui penyebab permasalahan. Dua kegiatan utama dalam menganalisis yaitu, memberi atribut *(attributeing)* berkaitan dengan mengidentifikasi sumber dan alasan dari suatu masalah. Mengorganisasikan *(organizing),* yaitu mengenali proses pembentukan hubungan dari unsur-unsur dalam situasi, menyusun dan menghubungkan informasi secara sistematis

5. C.5 mengevaluasi (*evaluate)*

   Evaluasi merupakan proses yang mengacu pada penilaian kualitas atau efektivitas sesuatu yang disesuaikan dengan kriteria dan standar tertentu. Kegiatan utama dalam mengevaluasi yaitu, mengecek *(checking)* yang mengarah pada menguji konsistensi dan keberhasilan suatu operasi atau produk dengan menilai sejauh mana rencana telah berjalan dengan baik. Mengkritisi *(critiquing)* mengarah pada kegiatan menilai yang melibatkan pemikiran kritis untuk melihat sisi positif dan negatif suatu hal

6. C.6 membuat *(create)*

   Membuat mengacu pada proses kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan untuk menggabungkan berbagai unsur menjadi pola yang baru dan menciptakan suatu produk baru. Kegiatan utama dalam membuat adalah menggenaralisasikan *(generating),* yaitu proses merepresentasikan masalah untuk menemukan alternatif hipotesis yang dibutuhkan. Sementara itu, memproduksi *(producing)* mengacu pada proses perencanaan untuk menangani masalah yang diberikan

b. Variabel Dependen (Y) : Kemampuan *Media relations*

Robbins dan Judge (Angreani et al., 2018) menyatakan bahwa, kemampuan (*ability)* merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu aktivitas tertentu. Sementara itu, Lesly (Iriantara, 2005) menjelaskan *media relations* sebagai cara berhubungan dengan sarana komunikasi yaitu media yang bertujuan untuk mengerjakan

publisitas atau menanggapi kepentingan media terhadap organisasi. Iriantara (2005) memperkaya pengertian *media relations* sebagai unsur dari *public relation external* yang berupaya membangun dan meluaskan hubungan baik dengan media massa sebagai instrumen komunikasi yang menjembatani organisasi dan publik untuk menggapai tujuan organisasi.

Iriantara (2005) menjelaskan bahwa pendekatan dalam mengelola *media relations* meliputi upaya untuk mengelola relasi, mengembangkan strategi dan meluaskan jaringan. Mengelola relasi merupakan urgensi Humas suatu organisasi untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan media sebagai institusi maupun wartawan sebagai representasi media massa. Hal yang termasuk didalamnya adalah kemampuan untuk menyusun daftar media potensial yang sesuai dengan kebutuhan organisasi berupa alamat, nomor telepon, nomor faks, alamat *e-mail,* dan narahubung. Upaya selanjutnya adalah mengembangkan strategi dan taktik yang didasarkan pada tujuan organisasi melakukan *media relations*. Selain itu, terdapat upaya untuk meluaskan jaringan yang dilakukan melalui organisasi profesi yang mana tidak hanya profesi kehumasan, namun juga profesi kewartawanan

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini akan mendefinisikan kemampuan *media relations* yang berhubungan dengan kemampuan Humas dalam mengelola konflik sengketa pemberitaan, kemampuan mengelola relasi dengan wartawan, dan kemampuan mengembangkan strategi dalam membina hubungan *media relations*.

2. Definisi Operasional

Operasional variabel atau definisi operasional menurut Kountur (2018), merupakan suatu penjelasan mengenai variabel-variabel penelitian yang dirumuskan dalam bentuk yang dapat diukur. Dapat dipahami bahwa, operasional variabel mengubah konsep yang masih bersifat abstrak menjadi sesuatu yang terukur.

Tabel 1.2
Operasional Variabel

Variabel PenelItian	Definsi Operasional	Indikator
Pengetahuan Regulasi Media (X)	Pengetahuan regulasi media mengacu pada sejauh mana individu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat yang	**a. Mengingat** Kemampuan Humas perguruan tinggi dalam memahami, mengenali, dan menyebutkan isi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berkaitan dengan *media relations* **b. Memahami**

	mencakup UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers	Kemampuan Humas perguruan tinggi dalam menafsirkan, menyimpulkan, membandingkan, mencontohkan, menjelaskan dan memprediksi isi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers **c. Mengaplikasikan** Kemampuan Humas perguruan tinggi dalam menjalankan, mengimplementasikan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers **d. Menganalisis** Kemampuan Humas perguruan tinggi dalam menjalankan dan mengimplementasikan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers **e. Mengevaluasi** Kemampuan Humas perguruan tinggi dalam menilai, membuktikan mengenai isi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers **f. Membuat** Kemampuan Humas perguruan tinggi dalam merumuskan, merencanakan mengenai isi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers
Kemampuan *Media relations* (Y)	Kemampuan *media relations* mengacu pada upaya yang dilakukan oleh Humas dalam menjalin dan mempertahankan hubungan positf dengan wartawan dan media, serta kemampuan dalam mengelola pemberitaan negatif.	**a. Mengelola Konflik** Tindakan yang dilakukan Humas perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan wartawan dan media massa **b. Mengelola Relasi** Tindakan yang dilakukan Humas perguruan tinggi dalam menjalin dan memelihara relasi dengan wartawan dan media massa **c. Mengembangkan Strategi** Tindakan yang dilakukan Humas perguruan tinggi dalam melakukan pendekatan dalam membina

		hubungan baik dengan wartawan dan media massa

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan paradigma positivistik dengan jenis penelitian kuantitatif. Melansir gagasan Sugiyono (2018) bahwa, penelitian kuantitatif merupakan upaya untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang telah ditentukan, kemudian data dianalis secara statistik, yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah digagas. Jenis penelitian korelasional akan digunakan untuk menguji sejauh mana variasi variabel berkaitan dengan variasi pada variabel lainnya berdasarkan koefisien korelasi

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner dalam rentang waktu dari bulan Juli hingga September 2024. Lokasi penelitian mencakup 18 perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta dari perguruan negeri dan swasta

3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

a. Populasi

Sugiyono mengemukakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang melibatkan objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik khusus yang akan dikaji, dipelajari, dan ditarik kesimpulannya (2018). Dalam penelitian ini populasi yang melingkupi adalah Humas perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 126, sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

b. Sampel

Jika populasi merupakan keseluruhan wilayah generalisasi, maka sampel dipahami sebagai representatif anggota yang mewakilkan jumlah maupun karakteristik yang melekat pada populasi. Cohen et al. (2007) menawarkan gagasan bahwa bertambah banyak jumlah sampel yang diambil dari populasi akan semakin

baik, namun jumlah minimal sampel yang harus diuji oleh peneliti adalah 30 sampel. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan jumlah sampel 32, yang diperoleh dari 16 perguruan tinggi Yogyakarta.

c. Teknik Sampling

Teknik sampling yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling.* Beranjak pada pemikiran (Sugiyono, 2018) bahwa teknik probabilitas merupakan upaya penentuan sampel dimana menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Dengan begitu diterapkannya jenis *random sampling* untuk memilih sampel dari populasi yaitu 126 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu subyek yang diteliti melalui kuesioner. Berdasarkan karakteristik penelitian kuantitatif, kuesioner membantu peneliti dalam meminimalisir bias dengan membatasi kemampuan pengaruh subjektivitas terhadap jawaban responden, sehingga dapat diperoleh data yang objektif dan berkualitas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang diperoleh penelitian ini bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, publikasi Daring, situs Daring, serta Undang-Undang No 40 Tahun 1999 mengenai Pers.

5. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menyesuaikan dengan masalah penelitian, sehingga peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan data primer melalui kuesioner. Sejalan dengan (Sugiyono, 2018) bahwa kuesioner merupakan instrumen riset yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup dimana peneliti membatasi dengan menyajikan jawaban yang berisikan alternatif pilihan melalui skala likert. Dalam penyebaran kuesioner peneliti mengoptimalkan *Google Form* untuk memfasilitasi

kemudahan selama proses pengambilan data karena bersifat fleksibel. Untuk memperoleh data primer, peneliti mendiseminasikan kuesioner kepada Humas perguruan tinggi di Yogyakarta.

6. Pengolahan Data

Upaya peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul dibagi menjadi langkah-langkah pengolahan data yaitu sebagai berikut:

a. **Pengumpulan Data *(Collecting)***

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai tujuan penelitian. Sebagaimana telah disebutkan bahwa data peneliti mengumpulkan data yang akan diuji melalui jawaban responden dari kuesioner.

b. Penyuntingan Data *(Editing)*

Data yang telah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyuntingan, yaitu dengan mengecek kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data dari jawaban responden. Tahap penyuntingan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah terkumpul sudah sesuai dengan kriteria atau harapan peneliti. Jika telah sesuai maka data dapat diidentifikasi atau dilanjutkan ke tahap *coding,* namun jika data belum sesuai peneliti harus memperbaiki atau mengganti data yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan.

c. Pengodean Data (*Coding)*

Data yang telah dipastikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, data akan diberikan simbol yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi ketika analisis data dengan mengkategorikan berdasarkan kriteria tertentu.

d. Tabulasi Data *(Tabulating)*

Data yang telah diklasifikasikan dengan pemberian kode, kemudian dimasukkan dan disusun ke dalam tabel. Tabulasi juga dipahami sebagai kegiatan memindahkan data ke dalam tabel dengan tujuan memudahkan peneliti ketika menghitung data.

7. Analisis Data

Data yang telah melewati tahap pengolahan, kemudian akan dianalisis oleh peneliti untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang akan diterapkan

adalah analisis regresi linear sederhana. Dalam menguji validitas instrumen, penelitian ini mengoptimalkan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah dan menganalisis data statistik, yaitu SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25. Terdapat uji instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi dasar berupa uji normalitas dan uji linieritas (Purnomo, 2016)

a. Uji Validitas

Validitas merujuk pada makna keabsahan, kebenaran, dan ketepatan. Dalam konteks ini, uji validitas ditujukan untuk menggambarkan sejauh mana instrumen sesuai dan tepat untuk digunakan dalam tujuan pengukuran penelitian. Sederhananya melihat apakah instrumen yang digunakan tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Metode yang digunakan untuk menguji validitas adalah uji korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson), yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap item atau pertanyaan dengan skor total yang terdiri dari seluruh total setiap skor item. Prosedur analisis validitas menggunakan SPSS yaitu dengan pilih menu Analyze, klik Correlate, pilih Bivariate, pindahkan seluruh item termasuk nilai total item ke kolom Variables, pada bagian Correlation Coefficient pilih Pearson, pada bagian Test of Significance pilih Two-tailed, kemudian centang bagian Flag significant correlations, kemudian klik OK.

Apabila nilai positif r hitung ≥ r tabel pada uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05, maka item pertanyaan atau instrumen terbukti valid, sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merujuk pada makna keajegan, keandalan, hal yang dapat dipercayai. Dalam konteks ini, uji reliabilitas dilakukan bermaksud untuk mengetahui konsistensi alat ukur yakni kuesioner. Sederhananya, dapat diartikan sebagai konsistensi alat ukur yang digunakan dalam penelitian yang menunjukan kemampuannya dalam memberikan hasil yang konsisten ketika diuji berulang kali terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas digarap setelah instrumen berhasil melewati tahap uji validitas. Jika terdapat instrumen yang tidak memenuhi kriteria validitas, maka harus dihilangkan sebelum melanjutkan ke tahap uji reliabilitas.

Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah *Cronbachs's Alpha* yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat reliabilitas melalui nilai koefisiennya. Prosedur analisis validitas menggunakan SPSS yaitu dengan pilih menu Analyze, klik Scale, pilih Reliability Analysis, pindahkan seluruh item kecuali nilai total item ke kolom Items, pada bagian model pilih Alpha, kemudian klik OK. Instrumen yang dianggap reliabel, harus memenuhi pertimbangan hasil koefisien reliabilitasnya r_{11} > 0,6. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu instrumen terdapat klasifikasi sebagai berikut:

1) Apabila alpha alpha > 0.90, termasuk tingkat sempurna
2) Apabila alpha antara 0.70 – 0.90, termasuk tingkat tinggi
3) Apabila alpha 0.50 – 0.70, termasuk tingkat moderat
4) Apabila alpha < 0.50, termasuk tingkat rendah

c. Uji Normalitas

Sebagaimana metode analisis parametrik yang membutuhkan uji normalitas untuk membuktikan apakah data termasuk dalam distribusi normal atau tidak. Eksistensi uji normalitas data merupakan hal krusial, karena data yang terdistribusi normal dianggap mampu mencerminkan karakteristik yang representatif dari populasi. Dengan menggunakan metode Klomogorov-Smirnov Test asumsi normalitas dapat ditinjau melalui nilai Signifikansi. Dengan ketentuan apabila Signifikansi > 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal, namun apabila Signifikansi < 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Prosedur analisis normalitas menggunakan SPSS yaitu dengan menginput nilai total seluruh variabel, kemudian klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel X ke kolom Independent(s), dan variabel Y ke kolom Dependent. Klik menu Save, kemudian pada Residuals centang bagian Unstandardized, klik Continue. Setelah mendapatkan nilai residual, klik Analyze, pilih Nonparametric Tests, klik Legacy Dialogs, pilih 1 Sample K-S, pindahkan nilai residual ke kolom Test Variable List, centang Normal pada bagian Test Distribution, dan klik OK.

d. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan dua variabel termasuk linear atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode *Test for Linearity* pada tingkat signifikansi 0,05. Prosedur uji linearitas menggunakan SPSS yaitu dengan klik menu Analyze, pilih Compare Means, klik Means, selanjutnya pindahkan nilai total variabel X ke kolom Independent List, variabel Y ke kolom Dependent List. Klik menu Options, pada

bagian Statistics for First Layer centang Test for linearity, selanjutnya klik Continue dan OK. Linearitas dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan apabila nilai signifikansi < 0,05, maka variabel dianggap tidak memiliki hubungan yang linear, sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0,05, maka variabel dianggap memiliki hubungan yang linear. Linearitas dalam hubungan kedua variabel, akan menentukan teknik analisis regresi selanjutnya. Jika data terbukti linear, maka dapat diterapkan analisis regresi linear. Sebaliknya, jika data memiliki hubungan yang tidak linear, maka dapat diterapkan analisis regresi non-linear.

e. Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan memahami bentuk hubungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan bentuk persamaan regresi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu regresi linear dan regresi non-linear.

1. Regresi Linear

Regresi linear merupakan pola hubungan yang terjadi apabila pengaruh variabel X terhadap variabel Y bersifat tetap atau konstan dan membentuk garis yang lurus pada grafik.

Persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Rumus untuk menentukan nilai a dan b yaitu sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum X^2 \ \sum Y - \sum X \sum XY}{n\sum X^2 \ - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n\sum X^2 \ \sum Y - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 \ - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

Y: Variabel terikat

a: Konstanta (nilai Y ketika X = 0)

b: Koefisien regresi

X: Variabel bebas

∑X: Jumlah nilai X

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat X

$\sum$Y: Jumlah nilai Y

$\sum$XY: Jumlah perkalian nilai X dan Y

2. Regresi Non-Linear

Regresi non-linear merupakan pola hubungan yang terjadi apabila pengaruh variabel X terhadap variabel Y tidak bersifat tetap atau konstan, artinya perubahan bisa meningkat atau menurun dan membentuk kurva pada grafik. Terdapat beberapa model yang dapat diterapkan dalam regresi non-linear yaitu:

a. Quadratic Model

Regresi kuadrat merupakan model yang menjelaskan hubungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dimana hubungan membentuk parabola. Persamaan regresi non-linear dengan fungsi kuadrat yaitu:

$$Y = a + bX + cX^2$$

Keterangan:

Y: Variabel terikat

a: Konstanta (nilai Y ketika X = 0)

b, c: Koefisien regresi

X: Variabel bebas

X^2 : Kuadrat variabel bebas

b. Exponential Model

Regresi non-linear model eksponensial merupakan metode yang melibatkan penyesuaian fungsi eksponen terhadap data. Persamaan regresi dengan fungsi eksponen yaitu:

$$Y = ae^{bX}$$

Keterangan:

a: Konstanta (nilai Y ketika X = 0)

b: Koefisien regresi

e: Bilangan Euler (2,71828)

X: Variabel bebas

f. Uji Hipotesis

1. **Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

Uji t merupakan uji statistik yang diterapkan secara parsial pada koefisien regresi, bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2019). Dasar pengambilan keputusan mengenai ketentuan penerimaan hipotesis dengan uji t yaitu:

a. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima, sehingga terbukti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ha diterima, sehingga terbukti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
b. Apabila nilai t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima, terbukti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai t-hitung > t-tabel, dinyatakan Ha diterima, terbukti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

2. **Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

Uji F merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengkaji secara bersama-sama seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2019). Dasar pengambilan keputusan mengenai ketentuan penerimaan hipotesis dengan uji F yaitu:

a. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima, sehingga terbukti secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ha diterima, sehingga terbukti secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
b. Apabila nilai F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima, sehingga terbukti secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai F-hitung > F-tabel, maka dinyatakan Ha diterima, terbukti secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Peran Humas di Perguruan Tinggi

Eksistensi humas di perguruan tinggi memiliki peran dan fungsi yang besar terhadap keberhasilan tujuan organisasi. Seperti halnya dengan peran penting praktik kehumasan bagi institusi pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai Kota Pelajar karena kehadiran berbagai pusat pendidikan yang berdiri di Jogja. Meninjau data dari buku *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Angka 2023* yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 terdapat 126 perguruan tinggi, dimana 109 dinaungi oleh Kemendikbudristek dan 17 dinaungi oleh Kementerian Agama (Rosliana & Jalil, 2023).

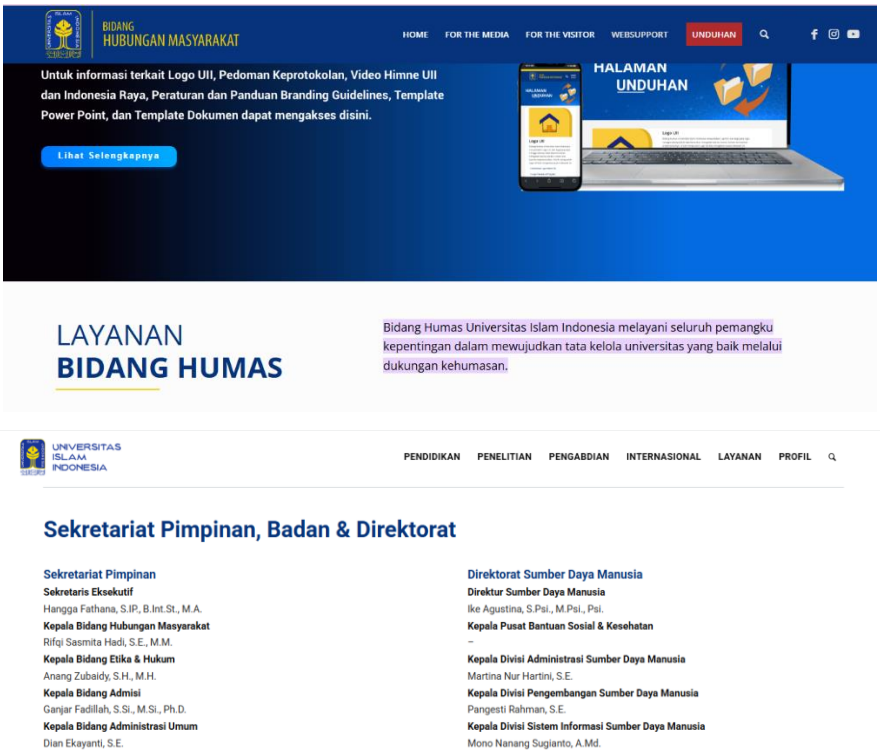
Hubungan masyarakat memiliki fungsi dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu melalui kegiatan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai publik organisasi, baik publik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Humas telah berkembang tidak hanya sebagai unit pendukung untuk menyampaikan pesan satu arah, tetapi telah bertransformasi menjadi bagian integral dari strategi manajemen komunikasi perguruan tinggi. Kompleksitas fungsi humas di perguruan tinggi selalu berkembang mengikuti dinamika komunikasi yang terjadi. Fungsi Humas meliputi manajemen informasi dan komunikasi, mempromosikan aktivitas dan prestasi civitas akademik, dan mengembangkan kerja sama dan kolaborasi eksternal. Di sisi lainnya, humas juga mengemban peran strategis yang meliputi penanganan krisis PR, serta pembangunan citra dan reputasi yang membentuk kredibilitas perguruan tinggi.

Dalam merespons perkembangan fungsi humas yang semakin kompleks, banyak perguruan tinggi di Yogyakarta telah menempatkan humas sebagai unit mandiri dalam struktur organisasinya. Struktur dan pemaknaan unit humas di perguruan tinggi menunjukkan keberagaman. Secara struktural, terdapat beberapa perguruan tinggi yang menempatkan humas sebagai unit mandiri dengan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan dan perencanaan program. Perguruan tinggi lain mengintegrasikan humas ke dalam unit yang lebih besar seperti sekretariat universitas atau kantor rektorat. Variasi pemaknaan tersebut menggambarkan bagaimana perguruan tinggi memaknai peran dan fungsi humas, yang mana akan berpengaruh pada implementasi program dan kontribusi humas terhadap pencapaian tujuan organisasi.

B. Pemaknaan Humas di Perguruan Tinggi

1. Universitas Islam Indonesia

Humas di Universitas Islam Indonesia bernama “Bidang Humas” ditempatkan di bawah naungan Sekretariat Pimpinan yang terletak di Gedung Rektorat yaitu GBPH Prabuningrat kampus UII.

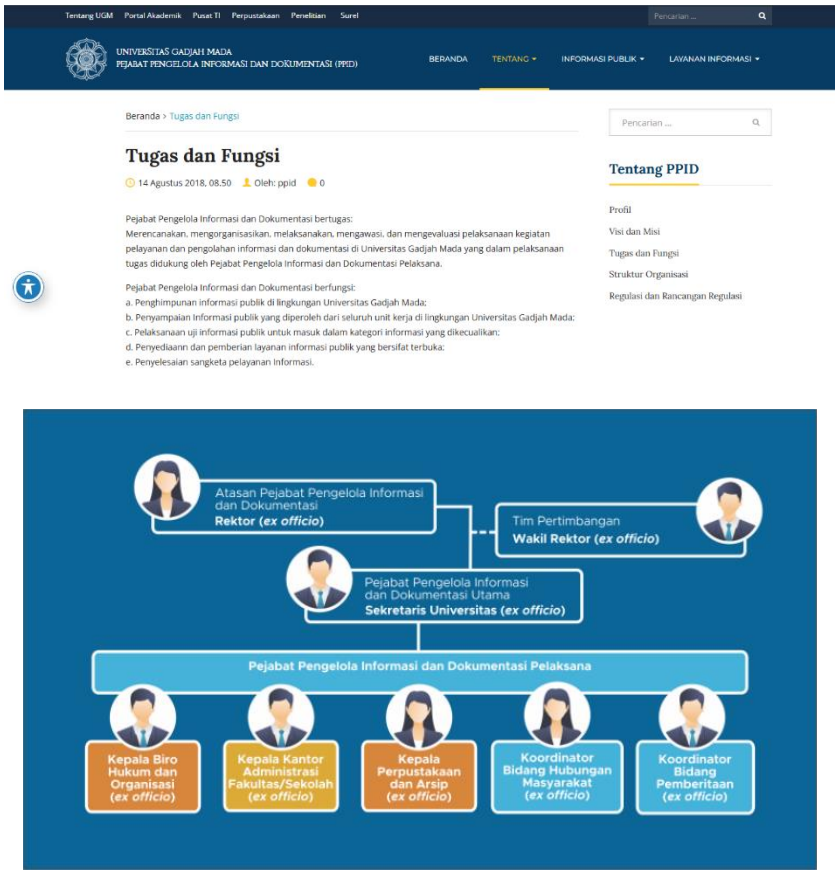


Gambar 2.1 Fungsi dan Struktur Humas UII

Sumber: Website UII

2. Universitas Gadjah Mada

Humas di Universitas Gadjah Mada tergabung dalam “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)“ dengan penamaan “Bagian Humas dan Protokol“ yang terletak di Kantor PPID Gedung Pusat UGM, Lantai 1 Sayap Selatan

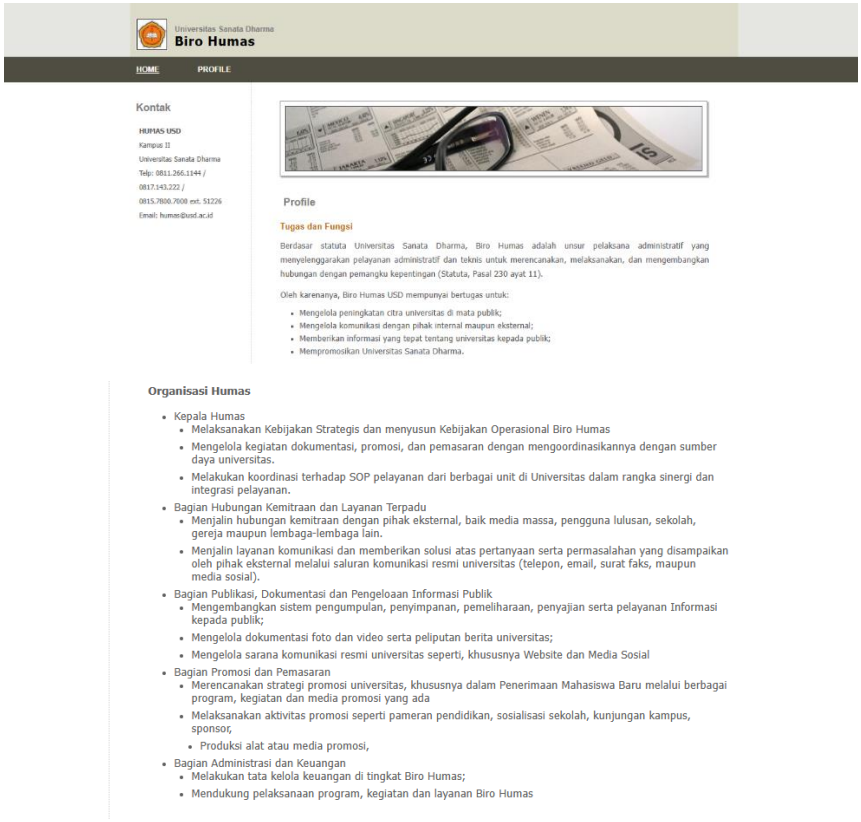


Gambar 2.2 Fungsi dan Struktur Humas UGM

Sumber: Website UGM

3. Universitas Sanata Dharma

Humas di Universitas Sanata Dharma membentuk organisasi mandiri bernama “Biro Humas” yang mana di dalam organisasi Humas terdiri dari Kepala Humas, Bagian Hubungan Kemitraan dan Layanan Terpadu, Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi Publik, Bagian Promosi dan Pemasaran, Bagian Administrasi dan Keuangan. Biro Humas berlokasi di kampus II Universitas Sanata Dharma. Humas memiliki fokus tugas dan fungsi dalam pengelolaan citra, komunikasi dan informasi, serta promosi.



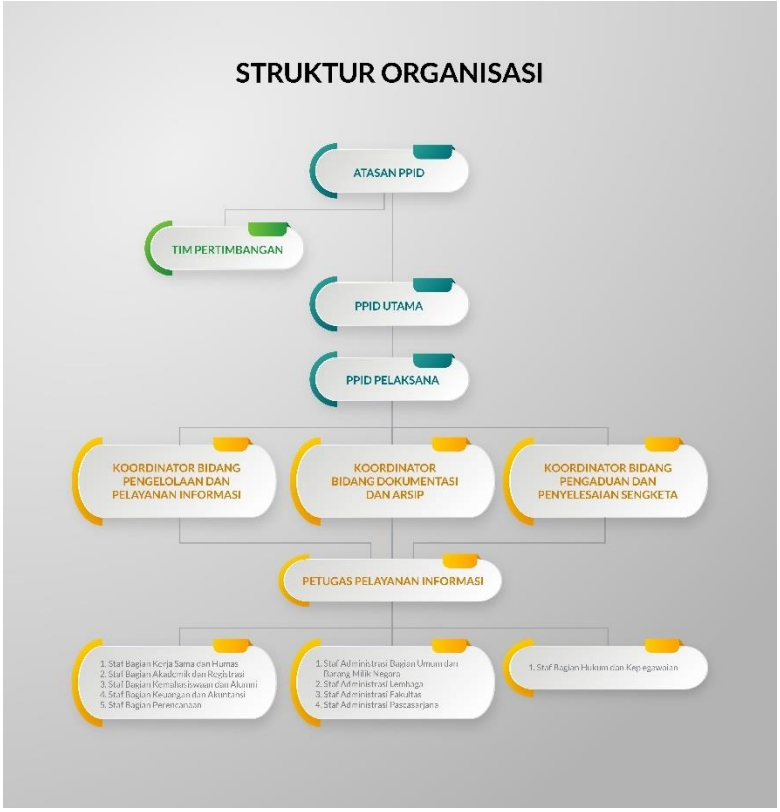
Gambar 2.3 Fungsi dan Struktur Humas USD

Sumber: Website USD

4. Universitas Negeri Yogyakarta

Humas di Universitas Negeri Yogyakarta tergabung dalam “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)“ dengan penamaan “Bidang Humas dan Promosi “ yang terletak di Hall Gedung Rektorat UNY Lantai 1.



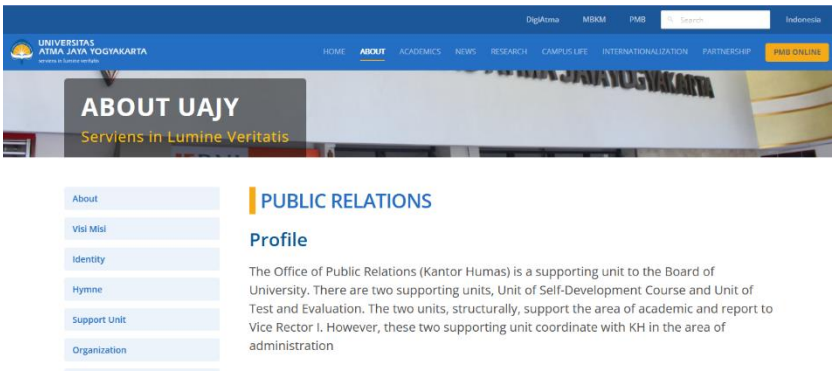


Gambar 2.4 Fungsi dan Struktur Humas UNY

Sumber: Website UNY

5. Universitas Atma Jaya

Humas di Universitas Atma Jaya berposisi sebagai unit pendukung bagi Dewan Universitas, yang terdiri dari Unit Kursus Pengembangan Diri serta Unit Test dan Evaluasi. Kedua unit tersebut berperan mendukung bidang akademik berada di pengawasan Wakil Rektor I. Humas dengan penamaan “Kantor Humas“ berlokasi di Kampus II Gedung Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Humas memiliki fokus tugas pada pembangunan dan pemeliharaan citra, membangun hubungan dengan publik eksternal dan internal, serta komunikasi dua arah dengan publik.

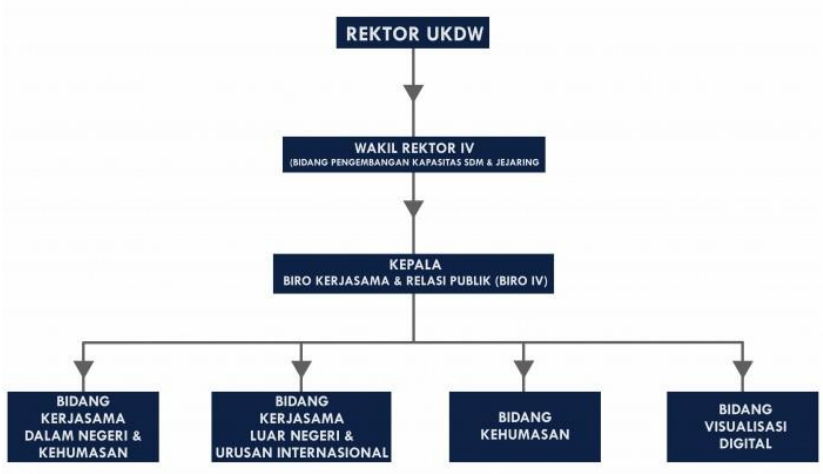




Gambar 2.5 Visi Misi Humas UAJY

Sumber: Website UAJY

6. Universitas Kristen Duta Wacana



Gambar 2.6 Struktur Humas UAJY

Sumber: Website UAJY

Humas di Universitas Kristen Duta wacana berposisi sebagai unit yang tergabung dalam Biro Kerja Sama & Relasi Publik dengan penamaan "Bidang Kehumasan" yang bertugas mengelola urusan administrasi terkait kolaborasi dan hubungan hubungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Biro Kerja Sama & Relasi Publik berada di bawah pengawasan Wakil Rektor IV yang membidangi Pengembangan Kapasitas SDM dan jejaring. Biro Kerja Sama & Relasi Publik berlokasi di Gedung Hagios Lantai 1.

7. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Humas di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa bernama "Biro Kehumasan dan Urusan Internasional (BKUI)". Biro Humas berlokasi di Gedung Pusat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Lantai 2. Humas memiliki fokus tugas dan fungsi mengelola hubungan dengan pihak eksternal baik dalam dan luar negeri khususnya di Tingkat Asia Tenggara, menjalin kemitraan dan memperkuat branding di kancah nasional dan internasional.



Gambar 2.7 Humas Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Sumber: Website Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

8. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Humas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membentuk sebuah divisi bernama "Biro Humas dan Protokoler". Biro Humas dan Protokoler dibagi menjadi Urusan Humas, Urusan Protokol, dan Urusan Website dan Media yang berlokasi di Gedung AR Fachruddin A Lantai Dasar Kampus Terpadu UMY.



Gambar 2.8 Fungsi dan Struktur Humas UMY

Sumber: Website Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

9. Universitas AMIKOM Yogyakarta

Humas di Universitas AMIKOM Yogyakarta membentuk unit mandiri dengan penamaan "Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional" yang terletak di Graha Universitas AMIKOM Yogyakarta.

10. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Humas di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang berada di bawah naungan Biro Kemahasiswaaan dan Kerja Sama dengan penamaan “Bagian Kerja Sama dan Humas“. Biro tersebut bertanggung jawab langsung kepada Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

11. UIN Sunan Kalijaga

Humas di UIN Sunan Kalijaga membentuk sebuah divisi bernama “Humas, Dokumentasi dan Publikasi” yang bernaung di bawah Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang merupakan bagian dari Bagian Umum.

12. Universitas Nahdlatul Ulama

Humas di Universitas Nahdlatul Ulama membentuk unit mandiri dengan penamaan “Direktorat Komunikasi“. Dalam struktur organisasi universitas, Direktorat Komunikasi beroperasi di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor Bidang Transformasi Kelembagaan dan Digitalisasi, yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan aspek komunikasi institusi.

13. Institut Teknologi Yogyakarta

Humas di Institut Teknologi Yogyakarta membentuk unit mandiri dengan penamaan “Humas ITY“. Dalam struktur organisasi universitas, Humas ITY beroperasi di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor II

14. Universitas Respati Yogyakarta

Humas di Universitas Respati Yogyakarta membentuk unit mandiri dengan penamaan “ Unit Layanan Kehumasan dan Protokoler” yang terletak di UNRIYO Kampus I.

15. Universitas Proklamasi 45

Humas di Universitas Proklamasi 45 membentuk unit dengan penamaan “Divisi Hubungan Masyarakat” yang terletak di Gedung A Lantai 2, Kampus Universitas Proklamasi 45.

16. Institut Seni Yogyakarta

Humas di Institut Seni Yogyakarta membentuk unit dengan penamaan “Hubungan Masyarakat ISI ” yang terletak di Gedung Rektorat Kampus ISI.

17. Universitas PGRI Yogyakarta

Dalam proses pengumpulan data profil penamaan humas di perguruan tinggi Yogyakarta, terdapat beberapa institusi yang tidak dapat diidentifikasi penamaan maupun struktur organisasi kehumasannya karena keterbatasan informasi pada website resmi. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menyajikan data dari perguruan tinggi yang mencantumkan informasi kehumasan secara jelas dan dapat diverifikasi melalui website resmi perguruan tinggi untuk menjaga keakuratan data**.**

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diperlukan dalam penelitian ini adalah praktisi Humas dari perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap karakteristik demografis dan latar belakang responden untuk memberikan gambaran komprehensif tentang sampel yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari 32 responden meliputi jenis kelamin, usia, dan lama pengalaman bekerja sebagai Humas, dan asal perguruan tinggi. Selain itu, berdasarkan pengalaman terlibat konflik dan penggunaan hak jawab dalam menyelesaikan kasus pemberitaan negatif.

a. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian ini menganalisis persebaran responden berdasarkan karakteristik demografis yaitu jenis kelamin. Data yang diperoleh menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara responden laki-laki dan perempuan. Tabel berikut menyajikan rincian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3.1
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	15	47%
Perempuan	17	53%
Total	32	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

b. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan karakteristik usia responden menunjukkan keberagaman usia dalam sampel penelitian. Jumlah responden diklasifikasikan menjadi lima rentang usia yaitu 23-30, 31-37, 38-45, 46-52, dan 53-60. Data yang diperoleh menggambarkan mayoritas responden berada dalam kelompok usia 31-37 tahun dan minoritas responden berada dalam

kelompok usia 53-60 tahun. Tabel berikut menyajikan rincian karakteristik responden berdasarkan usia:

Tabel 3.2
Karakteristik Responden Menurut Usia

Usia	Jumlah	Persentase
23-30	8	25%
31-37	11	34%
38-45	5	16%
46-52	6	19%
53-60	2	6%
Total	32	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

c. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Pengalaman Bekerja

Berdasarkan lama bekerja responden bervariasi, mulai dari praktisi Humas yang baru bergabung hingga yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Rentang pengalaman bekerja sebagai Humas berkisar dari enam bulan hingga 32 tahun. Tabel berikut menyajikan rincian karakteristik responden berdasarkan lama pengalaman bekerja sebagai Humas:

Tabel 3.3
Karakteristik Responden Menurut Pengalaman Bekerja

Pengalaman	Jumlah	Persentase
<1-8	24	75%
9-17	5	16%
18-36	3	9%
Total	32	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

d. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Perguruan Tinggi

Proses pengumpulan responden dilakukan selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2024. Peneliti pada awalnya mendistribusikan kuesioner kepada 32 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari upaya tersebut, sebanyak 18 perguruan tinggi menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi

dalam penelitian. Berdasarkan data yang telah terkumpul, sejumlah 32 responden yang mewakili 18 perguruan tinggi menggambarkan keberagaman latar belakang responden. Tabel berikut menyajikan persebaran responden berdasarkan asal perguruan tinggi:

Tabel 3.4
Karakteristik Responden Menurut Asal Perguruan Tinggi

No	Asal Perguruan Tinggi	Jumlah	Persentase
1	Universitas Negeri Yogyakarta	2	6%
2	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2	6%
3	Universitas Sanata Dharma	2	6%
4	Universitas Amikom Yogyakarta	2	6%
5	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	2	6%
6	Universitas Jenderal Achmad Yani	2	6%
7	Institut Teknologi Yogyakarta	1	3%
8	Universitas Kristen Duta Wacana	1	3%
9	Universitas Nahdlatul Ulama	3	9%
10	Universitas Gadjah Mada	4	13%
11	UIN Sunan Kalijaga	2	6%
12	Universitas Respati Yogyakarta	1	3%
13	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1	3%
14	Universitas Proklamasi 45	2	6%
15	Universitas PGRI Yogyakarta	2	6%
16	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	1	3%
17	Universitas Islam Indonesia	1	3%
18	Institut Seni Yogyakarta	1	3%
	Total	32	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

e. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Terlibat Konflik

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa 30 responden menyatakan tidak pernah terlibat konflik dengan wartawan atau media massa, semenyata itu, hanya 2 responden yang menyatakan pernah terlibat konflik dengan wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman yang terbatas dalam menghadapi konflik. Tabel berikut menyajikan rincian responden berdasarkan pengalaman terlibat konflik:

Tabel 3.5
Persebaran Persentase Responden yang Pernah Terlibat Konflik

Terlibat Konflik	Jumlah	Persentase
Ya	2	6%
Tidak	30	94%
Total	32	100%

Dari 2 responden yang memiliki pengalaman terlibat konflik, salah satu responden menyebutkan konflik yang terjadi adalah kesalahan pengutipan pernyataan. Responden lainnya menjelaskan bahwa konflik yang dialaminya berupa kesalahan penulisan berita oleh wartawan. Responden tersebut menyelesaikan konflik dengan menghubungi secara langsung wartawan yang terlibat untuk merevisi pemberitaan. Disebutkan juga bahwa penyelesaian dengan upaya tersebut hanya dapat dilakukan apabila praktisi Humas atau organisasi memiliki kedekatan personal dengan wartawan. Sebaliknya jika tidak, maka resolusi dapat dilakukan dengan mengirimkan surat resmi ke media yang berkaitan.

f. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Hak Jawab

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa 24 responden menyatakan tidak pernah menyelesaikan kasus pemberitaan negatif dengan mengirimkan hak jawab ke media massa. Terdapat 8 responden yang menyatakan pernah menggunakan hak jawab. Tabel berikut menyajikan rincian responden berdasarkan pengalaman menggunakan hak jawab:

Tabel 3.6
Persebaran Persentase Responden yang Pernah Menggunakan Hak Jawab

Menggunakan Hak Jawab	Jumlah	Persentase
Ya	8	25%
Tidak	24	75%
Total	32	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan jawaban 8 responden tersebut 2 responden pada pertanyaan sebelumnya menyatakan pernah terlibat konflik dengan wartawan atau media massa. Hal tersebut menunjukkan bahwa 6 responden yang menggunakan hak jawab, tidak menganggap bahwa kesalahan berita sebagai bagian dari konflik dengan wartawan atau media massa.

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif merupakan teknik statistik yang dilakukan untuk mempermudah interpretasi penilaian deskriptif dengan mengetahui sebaran frekuensi data. Variabel kemampuan *media relations* memuat indikator kemampuan mengelola konflik, kemampuan mengelola relasi, dan kemampuan mengembangkan strategi. Berikut merupakan standar penilaian responden:

Nilai penilaian terendah = 1

Nilai penilaian tertinggi = 4

Rentang nilai = Nilai tertinggi – Nilai terendah

= 4-1

= 3

Jumlah Kategori = 4 skala penilaian

$$\text{Interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$= \frac{3}{4}$$

$$= 0{,}75$$

Berdasarkan perolehan hasil di atas, maka ditetapkan batasan penilaian untuk setiap variabel sebagai berikut:

1,00 – 1,75 = Sangat rendah

1,76 – 2,50 = Rendah

2,51 – 3,25 = Tinggi

3,26 – 4,00 = Sangat tinggi

a. Variabel Pengetahuan Regulasi Media

Variabel Pengetahuan Regulasi media memuat 6 indikator, yaitu mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan membuat (C6). Berikut adalah tabel distribusi frekuensi untuk setiap indikator:

1) Indikator Mengingat (C1)

Tabel 3.7 menampilkan hasil survei untuk 5 item pernyataan mengenai kemampuan mengingat responden terhadap aspek-aspek regulasi media yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tabel 3.7
Distribusi Frekuensi Indikator Mengingat

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
C1.1	Saya memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep regulasi media yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers	0	8	19	5	93	2,91	Tinggi
C1.2	Saya dapat mengenali pasal-pasal relevan dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memiliki implikasi terhadap tugas dan tanggung jawab Humas dalam *media relations*	0	8	18	6	94	2,94	Tinggi
C1.3	Saya mampu menyebutkan pasal-pasal relevan dalam dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memiliki implikasi terhadap kegiatan *media relations*	1	13	15	3	84	2,63	Tinggi
C1.4	Saya mampu memahami dengan baik pengertian Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi	1	9	15	7	92	2,88	Tinggi
C1.5	Saya mampu menyebutkan pengertian Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi	0	11	16	5	90	2,81	Tinggi
Jumlah		2	49	83	26	453	2,83	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan tingkat kemampuan mengingat responden berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor total (2,83). Item C1.2 memperoleh skor capaian tertinggi (94) dan rata-rata skor tertinggi mencapai 2,94. Data tersebut mengindikasikan bahwa responden menganggap paling yakin dalam kemampuan mengenali pasal-pasal relevan yang berimplikasi pada tugas dan tanggung jawab Humas dalam *media relations*. Item C1.3 memperoleh skor capaian terendah (84) dengan rata-rata skor terendah (2,63). Hasil analisis mengindikasikan bahwa responden merasa kurang yakin mengenai kemampuan mereka untuk menyebutkan pasal-pasal yang berimplikasi pada tugas dan tanggung jawab Humas dalam *media relations.*

2) Indikator Memahami (C2)

Tabel 3.8 menampilkan hasil survei untuk 8 item pernyataan mengenai kemampuan memahami responden terhadap aspek-aspek regulasi media yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tabel 3.8
Distribusi Frekuensi Indikator Memahami

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
C2.1	Saya dapat menafsirkan dengan tepat penjelasan setiap pasal dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers	0	13	15	4	87	2,72	Tinggi
C2.2	Saya mampu menyimpulkan pasal-pasal penting dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pers	0	13	15	4	87	2,72	Tinggi
C2.3	Saya mampu menyimpulkan dengan baik fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa Pers	0	6	20	6	96	3,00	Tinggi
C2.4	Saya mampu menyimpulkan dengan baik ketentuan pidana jika Pers melanggar kewajiban Hak Jawab	0	12	16	4	88	2,75	Tinggi
C2.5	Saya mampu membandingkan hak dan kewajiban yang dimiliki Humas dan wartawan dalam penyelesaian sengketa Pers	0	6	22	4	94	2,94	Tinggi
C2.6	Saya mampu membandingkan hal apa yang bisa diadukan dan tidak bisa diadukan dalam penyelesaian sengketa Pers	0	9	19	4	91	2,84	Tinggi
C2.7	Saya mampu memberikan contoh konkret kasus Pers dalam konteks perguruan tinggi yang dapat diselesaikan sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers	0	15	12	5	86	2,69	Tinggi
C2.8	Saya mampu memprediksi dampak *media relations* dari setiap mekanisme penyelesaian sengketa pers yang tersedia termasuk melalui	1	5	23	3	92	2,88	Tinggi

	Dewan Pers, Kepolisian, ataupun Pengadilan							
Jumlah		1	79	142	34	721	2,82	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan tingkat kemampuan memahami responden berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor total (2,82). Item C2.3 memperoleh skor capaian tertinggi (96) dengan rata-rata skor tertinggi (3,00). Data tersebut mengindikasikan bahwa responden menganggap paling yakin dalam kemampuan menyimpulkan fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa Pers. Item C2.7 memperoleh skor capaian terendah (86) dengan rata-rata skor terendah (2,69). Hasil analisis mengindikasikan bahwa responden merasa kurang yakin mengenai kemampuan mereka untuk memberikan contoh konkret kasus sengketa Pers di perguruan tinggi yang dapat diselesaikan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3) Indikator Mengaplikasikan (C3)

Tabel 3.9 memaparkan hasil survei untuk 2 item pernyataan mengenai kemampuan mengaplikasikan responden terhadap aspek-aspek regulasi media yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tabel 3.9
Distribusi Frekuensi Indikator Mengaplikasikan

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
C3.1	Saya mampu menjalankan prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana telah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers	1	10	17	4	88	2,75	Tinggi
C3.2	Saya mampu mengimplementasikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor:01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers	1	12	15	4	86	2,69	Tinggi
Jumlah		2	22	32	8	174	2,72	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan tingkat kemampuan mengaplikasikan responden berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor total (2,72). Item C3.1 memperoleh skor capaian tertinggi (88) dengan rata-rata skor tertinggi (2,75). Data tersebut mengindikasikan bahwa

responden menganggap memiliki kemampuan menjalankan prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa Pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Item C3.2 memperoleh skor capaian terendah (86) dengan rata-rata skor terendah (2,69). Hasil analisis mengindikasikan bahwa responden merasa kurang yakin mengenai kemampuan mereka untuk mengimplementasikan mekanisme penyelesaian sengketa Pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor:01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

4) Indikator Menganalisis (C4)

Tabel 3.10 menampilkan hasil survei untuk 4 item pernyataan mengenai kemampuan menganalisis responden terhadap aspek-aspek regulasi media yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tabel 3.10
Distribusi Frekuensi Indikator Menganalisis

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
C4.1	Saya mampu menguraikan pasal krusial dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang membantu penyelesaian sengketa Pers	1	13	15	3	84	2,63	Tinggi
C4.2	Saya mampu mendeteksi berbagai jenis permasalahan yang dapat diselesaikan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers	0	11	18	3	88	2,75	Tinggi
C4.3	Saya mampu mengkorelasikan pasal dan ketentuan dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan permasalahan yang berpotensi muncul dalam kegiatan *media relations*	0	13	15	4	87	2,72	Tinggi
C4.4	Saya mampu memecahkan kasus sengketa Pers sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers	0	12	18	2	86	2,69	Tinggi
Jumlah		1	49	66	12	345	2,70	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan tingkat kemampuan menganalisis responden berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor total (2,70). Item C4.2 memperoleh skor capaian tertinggi (88) dengan rata-rata skor tertinggi (2,75). Data tersebut mengindikasikan bahwa responden menganggap memiliki kemampuan dalam mendeteksi jenis permasalahan yang dapat diselesaikan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Item C4.1 memperoleh skor capaian terendah (84) dengan rata-rata skor terendah (2,63). Hasil analisis mengindikasikan bahwa responden merasa kurang yakin mengenai kemampuan mereka untuk menguraikan pasal krusial dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membantu penyelesaian sengketa Pers.

5) Indikator Mengevaluasi (C5)

Tabel 3.11 menunjukkan hasil survei untuk 2 item pernyataan mengenai kemampuan mengevaluasi responden terhadap aspek-aspek regulasi media yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tabel 3.11
Distribusi Frekuensi Indikator Mengevaluasi

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
C5.1	Saya mampu menilai aspek penting dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan mengimplementasikan evaluasi tersebut dalam praktik *media relations*	0	9	19	4	91	2,84	Tinggi
C5.2	Saya mampu membuktikan apabila terdapat tindakan wartawan yang melanggar ketentuan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam konteks penyelesaian sengketa Pers	0	13	16	3	86	2,69	Tinggi
Jumlah		0	22	35	7	177	2,77	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan tingkat kemampuan mengevaluasi responden berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor total (2,77). Item C5.1 memperoleh skor capaian tertinggi (91) dengan rata-rata skor tertinggi (2,84). Data tersebut mengindikasikan bahwa responden menganggap memiliki kemampuan dalam menilai aspek penting dalam UU No.

40 Tahun 1999 tentang Pers, serta mengimplementasikan penilaian tersebut dalam kegiatan *media relations*. Item C5.2 memperoleh skor capaian terendah (86) dengan rata-rata skor terendah (2,69). Hasil analisis mengindikasikan bahwa responden merasa kurang yakin mengenai kemampuan mereka untuk membuktikan tindakan wartawan yang melanggar ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam proses penyelesaian sengketa Pers.

6) Indikator Membuat (C6)

Tabel 3.12 memaparkan hasil survei untuk 2 item pernyataan mengenai kemampuan membuat dengan aspek utama yaitu kemampuan merumuskan dan merencanakan.

Tabel 3.12
Distribusi Frekuensi Indikator Membuat

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
C6.1	Saya mampu merumuskan strategi komunikasi untuk mengelola konflik yang sesuai dengan ketentuan dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers	0	9	19	4	91	2,84	Tinggi
C6.2	Saya mampu merencanakan langkah-langkah dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan *media relations* yang sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers	0	8	20	4	92	2,88	Tinggi
Jumlah		0	17	39	8	183	2,86	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan tingkat kemampuan membuat responden berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor total (2,86). Item C6.2 memperoleh skor capaian tertinggi (92) dengan rata-rata skor tertinggi (2,88). Data tersebut mengindikasikan bahwa responden menganggap memiliki kemampuan dalam merencanakan langkah-langkah mengelola dan menyelesaikan permasalahan *media relations* yang berpotensi terjadi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Item C6.1 memperoleh skor capaian terendah (91) dengan rata-rata skor terendah (2,84). Hasil analisis mengindikasikan bahwa meskipun memperoleh skor sedikit lebih rendah responden menunjukkan kepercayaan diri dalam merumuskan strategi komunikasi yang tepat untuk mengelola konflik sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang.

b. Variabel Kemampuan *Media relations*

1) Indikator Kemampuan Mengelola Konflik (K)

Tabel 3.13 menyajikan hasil survei mengenai indikator kemampuan mengelola relasi yang mencakup 8 item pernyataan (K1-K8).

Tabel 3.13
Distribusi Frekuensi Indikator Mengelola Konflik

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
K1	Apabila terdapat pemberitaan negatif mengenai perguruan tinggi, maka langkah awal yang saya lakukan adalah mengirimkan Hak Jawab atau Hak Koreksi kepada Pers yang bersangkutan	0	4	18	10	102	3,19	Tinggi
K2	Apabila terdapat pemberitaan negatif, saya mampu mengelola dan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang tersedia dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers	0	7	19	6	95	2,97	Tinggi
K3	Saya mampu untuk tetap mempertahankan hubungan baik dengan wartawan dan media massa yang bersangkutan bahkan setelah penyelesaian sengketa Pers	1	0	25	6	100	3,13	Tinggi
K4	Apabila perguran tinggi sedang mengalami krisis dan terbit berita buruk, sebagai Humas saya tidak akan meminta Pers untuk mencabutnya di luar prosedur yang tersedia	0	8	16	8	96	3,00	Tinggi
K5	Saya telah memiliki kesigapan dan kewaspadaan menghadapi segala jenis krisis yang berpotensi timbul dalam *media relations*	0	5	21	6	97	3,03	Tinggi
K6	Saya mampu memperlihatkan integritas sebagai Humas dan integritas perguruan tinggi	0	3	21	8	101	3,16	Tinggi

	kepada wartawan dan media massa							
K7	Saya mampu memberikan klarifikasi pemberitaan negatif dengan baik	0	3	22	7	100	3,13	Tinggi
K8	Apabila terjadi krisis pada perguruan tinggi, saya mampu menunjuk juru bicara yang tepat untuk menerapkan prinsip berbicara dengan satu suara	0	2	24	6	100	3,13	Tinggi
Jumlah		1	32	166	57	791	3,09	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan, tingkat kemampuan responden untuk mengelola konflik dalam praktik *media relations* berada dalam kategori tinggi, dengan perolehan rata-rata skor total mencapai 3,09 dari skala 4. Item K1 memperoleh skor capaian tertinggi (102) dengan rata-rata 3,19. Data tersebut menggambarkan pemahaman yang baik dan keyakinan yang tinggi mengenai kemampuan responden dalam menangani pemberitaan negatif dengan mengirimkan hak jawab atau hak koreksi. Item K2 memiliki skor capaian terendah (95) dengan rata-rata 2,97, meskipun masih tergolong kategori tinggi, hasil tersebut mengindikasikan bahwa responden memiliki lebih banyak tantangan dalam mengelola dan menyelesaikan pemberitaan negatif sesuai dengan prosedur UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

2) Indikator Kemampuan Mengelola Relasi (R)

Tabel 3.14 menampilkan hasil survei mengenai indikator kemampuan responden dalam mengelola relasi dengan wartawan dan media, yang mana terdiri dari tiga item pernyataan (R1-R3).

Tabel 3.14
Distribusi Frekuensi Indikator Mengelola Relasi

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
R1	Saya mampu menjalin dan mempertahankan kontak dengan wartawan ataupun media massa	0	1	22	9	104	3,25	Tinggi

R2	Saya mampu menyusun dan memperbarui daftar media yang dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, e-mail, dan narahubung	0	1	23	8	103	3,22	Tinggi
R3	Saya mampu menyiapkan daftar kontak Humas perguruan tinggi yang dapat dihubungi oleh wartawan dan media massa	0	4	21	7	99	3,09	Tinggi
Jumlah		0	6	66	24	306	3,19	Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan tingkat kemampuan responden dalam mengelola relasi media berada dalam kategori tinggi, dengan perolehan rata-rata skor total mencapai 3,19 dari skala 4. Item R1 memperoleh skor capaian tertinggi (104) dengan rata-rata 3,25. Data tersebut menggambarkan bahwa responden memiliki kemampuan yang baik dalam menjalin dan memelihara kontak dengan wartawan ataupun media massa. Dibandingkan dengan dua item lainnya, item K2 memiliki skor capaian terendah (99) dengan rata-rata 3,09. Berdasarkan data tersebut, mengindikasikan terdapat lebih banyak tantangan bagi Humas dalam menyiapkan kontak yang dapat dihubungi oleh wartawan dan media massa.

3) Indikator Kemampuan Mengembangkan Strategi (S)

Tabel 3.15 menyajikan hasil survei mengenai indikator kemampuan responden dala mengembangkan strategi dalam *media relations*, yang mana terdiri dari enam item pernyataan (S1-S6).

Tabel 3.15
Distribusi Frekuensi Indikator Mengembangkan Strategi

No	Item	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)	Skor capaian	Mean	Kategori
S1	Saya mampu menyampaikan berita secara jujur ketika bekerja sama dengan wartawan baik di	0	1	24	7	102	3,19	Tinggi

	masa sulit (krisis) maupun masa baik							
S2	Saya mampu memberikan pelayanan berupa tulisan yang dianggap memiliki nilai berita dan gambar yang layak, menarik, dan aktual sesuai dengan kebutuhan wartawan	0	2	21	9	103	3,22	Tinggi
S3	Sebagai Humas perguruan tinggi saya tidak akan memohon hingga memaksa supaya berita perguruan tinggi dimuat oleh wartawan	1	1	17	13	106	3,31	Sangat Tinggi
S4	Saya mampu mempertahankan *media relations* dengan mengetahui kebutuhan media, cara kerja media, dan kode etik media	0	1	20	11	106	3,31	Sangat Tinggi
S5	Sebagai Humas perguruan tinggi, saya mampu berbicara dari sudut pandang kepentingan publik	0	1	23	8	103	3,22	Tinggi
S6	Saya mampu menghindari pertengkaran dengan wartawan maupun media massa yang tidak diperlukan	0	1	21	10	105	3,28	Sangat Tinggi
Jumlah		1	7	126	58	625	3,26	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Secara keseluruhan, tingkat kemampuan responden untuk mengelola konflik dalam praktik *media relations* berada dalam kategori sangat tinggi, dengan perolehan rata-rata skor total mencapai 3,26 dari skala 4. Item S3 dan S4 memperoleh skor capaian tertinggi (106) dengan rata-rata 3,31 dalam kategori penilaian sangat tinggi. Data tersebut menggambarkan pemahaman yang baik dalam memahami etika kerja sama dengan media dan memahami kebutuhan dan cara kerja media. Item S1 memiliki skor capaian yang lebih rendah (102) dengan rata-rata 3,19, meskipun masih tergolong kategori tinggi, hasil tersebut mengindikasikan bahwa responden memiliki lebih banyak tantangan dalam menyampaikan berita secara jujur baik di masa krisis maupun di masa baik.

3. Hasil Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Tabel 3.16 menyajikan hasil uji validitas untuk 23 item pernyataan yang ditetapkan untuk menguji variabel pengetahuan regulasi media. Uji validitas berperan dalam menilai ketepatan dan kebenaran suatu instrumen, memastikan bahwa instrumen yang digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya diukur

Tabel 3.16
Uji Validitas Variabel Pengetahuan Regulasi Media

No	Corrected Item- Total Correlation / r hitung	Sig.	r tabel	Keterangan
1	0.833	0.000	0.349	Valid
2	0.823	0.000	0.349	Valid
3	0.832	0.000	0.349	Valid
4	0.796	0.000	0.349	Valid
5	0.930	0.000	0.349	Valid
6	0.866	0.000	0.349	Valid
7	0.902	0.000	0.349	Valid
8	0.805	0.000	0.349	Valid
9	0.808	0.000	0.349	Valid
10	0.867	0.000	0.349	Valid
11	0.936	0.000	0.349	Valid
12	0.872	0.000	0.349	Valid
13	0.649	0.000	0.349	Valid
14	0.918	0.000	0.349	Valid
15	0.908	0.000	0.349	Valid
16	0.890	0.000	0.349	Valid
17	0.904	0.000	0.349	Valid
18	0.934	0.000	0.349	Valid
19	0.860	0.000	0.349	Valid
20	0.913	0.000	0.349	Valid
21	0.889	0.000	0.349	Valid
22	0.925	0.000	0.349	Valid

23	0.913	0.000	0.349	Valid

Sumber: Data Primer Diolah Dengan SPSS, 2024

Seluruh item menunjukkan nilai korelasi (r hitung) yang lebih besar dari nilai r tabel (0,349) yang diperoleh dari tabel r untuk 32 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Korelasi tertinggi diperoleh oleh item 11 dengan nilai r (0,936), sedangkan nilai korelasi terendah ditemukan pada item 13 dengan nilai r (0,649). Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen yang digunakan untuk menguji variabel pengetahuan regulasi media telah terbukti valid dan dinyatakan layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Tabel 3.17
Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan *Media relations*

No	Corrected Item- Total Correlation / r hitung	Sig.	r tabel	Keterangan
1	0.561	0.000	0.349	Valid
2	0.584	0.000	0.349	Valid
3	0.827	0.000	0.349	Valid
4	0.564	0.000	0.349	Valid
5	0.788	0.000	0.349	Valid
6	0.807	0.000	0.349	Valid
7	0.795	0.000	0.349	Valid
8	0.904	0.000	0.349	Valid
9	0.900	0.000	0.349	Valid
10	0.825	0.000	0.349	Valid
11	0.681	0.000	0.349	Valid
12	0.782	0.000	0.349	Valid
13	0.820	0.000	0.349	Valid
14	0.890	0.000	0.349	Valid
15	0.911	0.000	0.349	Valid
16	0.565	0.000	0.349	Valid
17	0.799	0.000	0.349	Valid

Sumber: Data Primer Diolah Dengan SPSS, 2024

Tabel 3.17 memaparkan hasil uji validitas untuk 17 item pernyataan yang digunakan untuk menguji variabel kemampuan *media relations*. Seluruh item menunjukkan nilai korelasi (r hitung) yang lebih besar dari nilai r tabel (0,349) yang diperoleh dari tabel r untuk N= 32 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Korelasi tertinggi diperoleh oleh item 15 dengan nilai r (0,911), sedangkan nilai korelasi terendah ditemukan pada item 1 dengan nilai r (0,561). Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen yang digunakan untuk menguji variabel kemampuan *media relations* telah terbukti valid dan dinyatakan layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 3.18 menyajikan hasil uji reliabilitas variabel Pengetahuan Regulasi Media (X) dan variabel Kemampuan *Media relations* (Y). Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur hasil yang dapat dipercaya secara konsisten

Tabel 3.18
Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

No	Variabel	r alpha	r kritis	Keterangan
1	Pengetahuan Regulasi Media	0.985	0.600	Reliabel
2	Kemampuan *Media relations*	0.950	0.600	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah Dengan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel 3.18 dapat diinterpretasikan bahwa seluruh variabel menunjukkan hasil yang reliabel dengan tingkat reliabilitas sempurna. Variabel Pengetahuan Regulasi Media memperoleh nilai r alpha sebesar 0.985, sedangkan variabel Kemampuan *Media relations* memperoleh hasil nilai r alpha sebesar 0.950. Kedua variabel dalam penelitian ini menghasilkan nilai r yang lebih besar dari r kritis (0.600). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian ini telah lolos uji reliabilitas dengan tingkat reliabilitas sempurna dan dinyatakan sangat layak digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

4. Hasil Pengujian Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Tabel 3.19 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov Test*. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah persebaran data dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak.

Tabel 3.19
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	5,40295182
Most Extreme Differences	Absolute	0,132
	Positive	0,107
	Negative	-0,132
Test Statistic		0,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.167[c]

Sumber: Data Primer yang Diolah Dengan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang termuat dalam tabel 3.19, dapat diinterpretasikan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.167, yang mana lebih besar dari standar nilai signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan data yang diambil cukup untuk merepresentasikan populasi yang diteliti.

b. Uji Linearitas

Tabel 3.20 menyajikan hasil uji linearitas yang merupakan prasyarat penting dalam analisis regresi linear. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang linear dalam variabel pengetahuan regulasi media dan kemampuan *media relations*. Hubungan linear menggambarkan setiap perubahan yang terjadi pada variabel X akan diikuti oleh perubahan yang konsisten pada variabel Y.

Tabel 3.20
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Kemampuan *Media relations* * Pengetahuan Regulasi Media	Between Groups	(Combined)	1619.375	23	70.408	102.411	.000
		Linearity	719.926	1	719.926	1047.166	.000
		Deviation from Linearity	899.449	22	40.884	59.468	.000
	Within Groups		5.500	8	.688		
	Total		1624.875	31			

Sumber: Data Primer yang Diolah Dengan SPSS, 2024

Hasil uji linearitas pada variabel pengetahuan regulasi media dan kemampuan *media relations* menunjukkan nilai deviation from linearity signifikansi sebesar 0.000. Mengacu pada dasar pengambilan keputusan bahwa syarat linearitas data nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel pengetahuan regulasi media dan kemampuan *media relations* tidak mengikuti pola linear. Dengan begitu, penelitian ini mengubah teknik analisis dari uji regresi linear menjadi uji regresi non-linear. Tahap selanjutnya adalah menetapkan model uji regresi non-linear yang paling sesuai dengan data dalam penelitian ini melalui estimasi kurva atau *curve estimation* di SPSS.

c. Kurva Estimasi Model Non-Linear

Kurva estimasi merupakan fitur software SPSS yang berguna untuk membantu menentukan model non-linear yang tepat dan sesuai dengan data yang dimiliki. Hasil analisis berdasarkan *curve estimation* dalam tabel 3.22 menunjukkan bahwa model quadratic merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

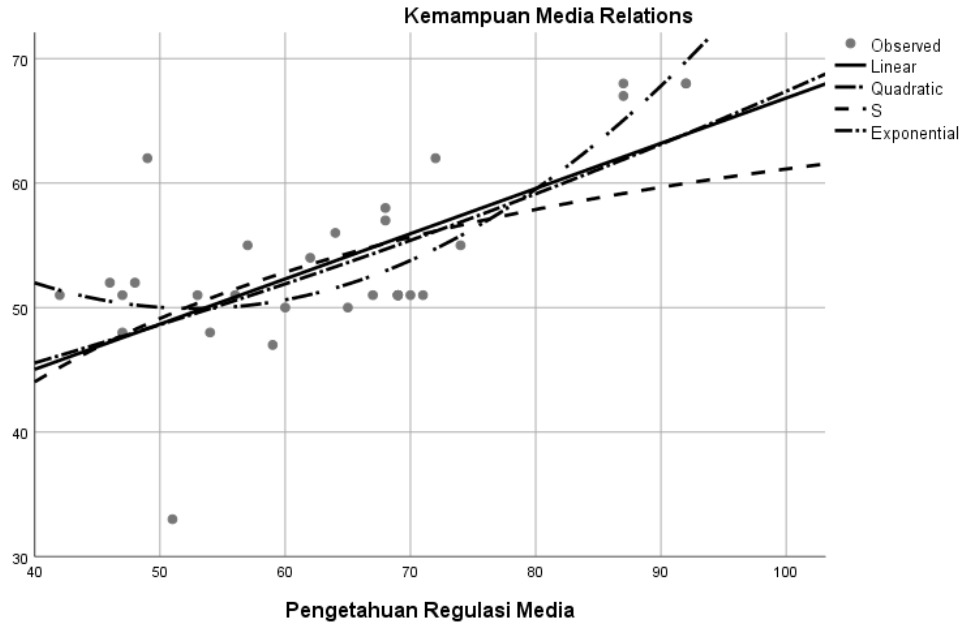
Tabel 3.21
Hasil Perbandingan Model Regresi Non-Linear

Sumber: Data Primer yang Diolah Dengan SPSS, 2024

Persamaan	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Linear	0,666	0,443	0,425	5,492
Quadratic	0,764	0,583	0,555	4,831
S	0,533	0,284	0,260	0,199
Exponential	0,626	0,392	0,371	0,110

Model quadratic menunjukkan kecocokan dengan data dalam penelitian ini, karena memiliki nilai R-square yang tertinggi dan standar error estimasi yang rendah di antara model linear, S, dan exponential. Model quadratic memiliki nilai R sebesar 0,764, nilai R Square sebesar 0,583, serta standar error estimasi sebesar 4,831. Koefisien korelasi (R = 0,764) menunjukkan hubungan yang kuat dan positif di antara kedua variabel. Hal tersebut dapat dipahami bahwa perubahan variabel pengetahuan regulasi media berhubungan erat dengan perubahan variabel kemampuan *media relations*. Koefisien determinasi (R Square = 0,583) menunjukkan 58,3% dapat menjelaskan hubungan terhadap variabel kemampuan *media relations*. Terdapat 41,7% faktor dari variabel lain diluar variabel yang diamati yang mempengaruhi variabel kemampuan *media relations*.

Gambar 3.1
Kurva Estimasi Model Non-Linear



Sumber: Data Primer yang Diolah Dengan SPSS, 2024

Gambar 3.1 menunjukkan pola kurva model kuadratik berbentuk U dengan lengkungan seperti parabola yang terbuka ke atas. Hubungan antara kedua variabel dapat diinterpretasikan dalam tiga tahap pengaruh. Tahap awal yaitu dengan rentang nilai pengetahuan 40 – 60, kemudian tahap menengah dengan rentang nilai 60 – 80, serta tahap akhir dengan rentang nilai > 80.

5. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil uji hipotesis secara parsial variabel pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations*:

Tabel 3.22
Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.508	4.868		6.267	.000
	Pengetahuan Regulasi Media	.363	.074	.666	4.885	.000

Sumber: Data Primer yang Diolah Dengan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) yang disajikan dalam tabel 3.22 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar 4,885 yang mana menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,695 dengan df=31 dan α = 0,05. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,00 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima. Nilai t-hitung dan nilai signifikansi menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan regulasi media (X) terhadap kemampuan *media relations* (Y).

b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil uji hipotesis secara simultan variabel pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations*:

Tabel 3.23
Hasil Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	719.926	1	719.926	23.866	.000[b]
	Residual	904.949	30	30.165		
	Total	1624.875	31			

Sumber: Data Primer yang Diolah Dengan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan (uji F) yang disajikan dalam tabel 3.23 dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kemampuan *media relations*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F-hitung sebesar 23.866 yang mana lebih besar dari nilai F-tabel yaitu 1,695. Nilai F-tabel diperoleh dari df (N1) = k (jumlah variabel) - 1 = 1 dan df (N2) = n (jumlah responden) – k = 30, serta probabilita = 0,05. Selain ditinjau dari nilai F-hitung, mengacu pada dasar pengambilan keputusan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,00 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan dari pengetahuan regulasi media (X) terhadap kemampuan *media relations* (Y).

B. Pembahasan

Penelitian ini mengkaji Pengaruh Pengetahuan Regulasi Media terhadap Kemampuan *Media Relations* di Humas Perguruan Tinggi. Dengan menetapkan praktisi humas sebagai subjek penelitian, telah diperoleh data yang disebarkan melalui kuesioner kepada 32 praktisi Humas dari 18 perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini memiliki 40 pernyataan yang teruji valid dan dua variabel yaitu, Pengetahuan Regulasi Media sebagai variabel bebas dan Kemampuan *Media Relations* sebagai variabel terikat yang teruji dengan reliabilitas sempurna.

Berdasarkan data yang telah terkumpul, tercatat bahwa terdapat 8 humas yang menyatakan pernah menggunakan hak jawab dalam menangani kasus pemberitaan negatif. Berikut adalah beberapa pengalaman yang dibagikan oleh responden melalui kuesioner online. Responden dari Universitas Negeri Yogyakarta pernah mengelola kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Responden menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan untuk menangani pemberitaan negatif tersebut adalah dengan menyampaikan klarifikasi mengenai kasus yang terjadi kepada media yang terlibat dengan menggunakan media sosial.

Responden dari Universitas Atma Jaya membagikan pengalamannya dalam menangani kesalahan pengutipan pernyataan yang disampaikan kepada wartawan. Responden menyebutkan bahwa sengketa pemberitaan yang terjadi pada tahun 2007, berkaitan dengan pemberitaan tentang pendapat perguruan tinggi terhadap terorisme dan pengeboman. Upaya yang dilakukan responden adalah dengan mengajukan surat keberatan mengenai kesalahan pengutipan *statement* kepada wakil pemimpin redaksi, dimana sebelumnya mereka telah memiliki hubungan interpersonal yang baik. Setelah menerima surat tersebut, wakil pemimpin redaksi menyampaikan permohonan maaf dan mengirimkan wartawan yang terlibat untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan informasi yang telah dipublikasikan.

Responden dari Institut Teknologi Yogyakarta menceritakan pengalamannya dalam menangani kesalahan informasi di media sosial TikTok. Menurut penjelasan responden kesalahan informasi yang dimaksud berkaitan dengan kesalahan penyebutan nama institusi perguruan tinggi dalam pemberitaan sebuah kasus. Sebagai langkah pemulihan reputasi dan nama baik institusi, responden tersebut mengajukan permintaan penghapusan atau *take down* narasi yang tidak akurat tersebut.

Responden dari Universitas Kristen Duta Wacana, meskipun tidak menjelaskan mengenai pemberitaan negatif terkait, namun disebutkan bahwa langkah pertama yang diambil adalah dengan mengirimkan surat tanggapan terhadap pemberitaan tersebut. Tindakan ini dilanjutkan dengan mengajukan hak untuk permintaan klarifikasi kepada media yang bertanggung jawab atas publikasi tersebut. Di sisi lainnya beberapa responden tidak menjelaskan langkah-langkah penanganan, namun hanya menyebutkan judul berita dari kasus pemberitaan yang pernah mereka tangani. Seperti responden dari Universitas Sanata Dharma dalam menyikapi berita yang bertajuk *"Ini Daftar Perguruan Tinggi yang Diduga*

Terlibat TPPO Berkedok Magang lewat Ferienjob di Jerman" (tempo.co, 28 Maret 2024). Di sisi lainnya responden yang mewakili Universitas Gadjah Mada dalam menangani pemberitaan mengenai Generasi Z cemas dalam menghadapi indonesia emas 2045 di harian Kompas.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, mayoritas Humas perguruan tinggi dalam menangani sengketa pemberitaan adalah dengan mengajukan Hak Jawab melalui surat permohonan klarifikasi kepada media terkait. Mengingat terbatasnya informasi yang disampaikan oleh praktisi Humas perguruan tinggi lainnya, peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan yang dilakukan Humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mengelola pemberitaan negatif.

Pada tahap awal krisis responden menjelaskan langkah yang dilakukan selama krisis berlangsung, media massa memberikan perhatian besar terhadap kasus tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu Juli hingga Agustus, tercatat 80 artikel kasus tersebut telah dimuat dalam media massa online. Respondne menjelaskan tahap penanganan yang dilakukan. Responden menjelaskan tahapan penanganan yang dilakukan:

"Proses Humas UMY menyelesaikan pemberitaan tersebut adalah dengan terlebih dahulu mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut. Dengan melakukan koordinasi bersama Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) dan Biro Hukum UMY "

Responden menjelaskan bahwa setelah memperoleh informasi mengenai kebenaran dari berita tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu pimpinan perguruan tinggi, yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol (BHP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Proses koordinasi tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang kemudian sampaikan melalui *press release* dan didistribusikan kepada jaringan media mitra. Dalam hal ini, UMY telah menerapkan strategi komunikasi terbuka dengan mencantumkan informasi terverifikasi yang diperoleh humas dari pihak kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh humas UMY untuk memastikan transparansi informasi meliputi pembukaan akses komunikasi dua arah bagi rekan media mitra yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan penyelesaian kasus tersebut. Humas UMY juga menyediakan jalur komunikasi yang jelas, termasuk memberikan kesempatan untuk

wartawan agar dapat melakukan wawancara langsung dengan pimpinan perguruan tinggi. Responden menambahkan bahwa humas UMY juga menerapkan teknik *counter* berita negatif dengan menonjolkan pemberitaan positif seperti kegiatan perguruan tinggi dan prestasi yang diraih oleh civitas akademika UMY. Strategi yang dilakukan oleh humas UMY bertujuan untuk mengalihkan fokus dari pemberitaan negatif ke positif.

Berdasarkan pemaparan tersebut strategi yang diaplikasikan oleh humas UMY adalah strategi komunikasi terbuka yang menggambarkan pendekatan komprehensif dan profesional. Dalam pendekatan mengelola relasi humas dengan wartawan, humas UMY telah mengimplementasikan pemahamannya terhadap kebutuhan media selama masa krisis dengan menyediakan akses komunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi dalam memfasilitasi komunikasi yang responsif. Hal tersebut termuat dalam jawaban responden yang diberikan oleh Humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

> *"Humas UMY juga membuka informasi seluas-luasnya kepada rekan media partner yang ingin menanyakan tentang progres penyelesaian kasus tersebut"*

Sebagaimana yang ditekankan oleh Iriantara (2005) dalam pendekatan mengembangkan strategi untuk memelihara citra positif organisasi, humas UMY telah menempatkan diri sebagai sumber informasi yang terpercaya, kredibel, dan berharga bagi media massa. Dengan menjadikan pimpinan perguruan tinggi sebagai juru bicara, praktisi humas secara tidak langsung membangun kredibilitas di mata media. Upaya tersebut diperkuat dengan memastikan akurasi dan aktualitas informasi yang disampaikan kepada media massa melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi yang dilakukan secara berlapis dengan berbagai unit internal, seperti LPKA, Biro Hukum, serta pimpinan perguruan tinggi, menggambarkan komitmen praktisi humas dalam membangun pesan yang konsisten.

Lebih lanjut, manajemen aksesibilitas informasi diimplementasikan secara sistematis dengan menciptakan jalur komunikasi yang jelas. Dalam konteks ini, humas berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan media dengan sumber informasi terpercaya, yaitu pimpinan perguruan tinggi. Pendekatan tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya informasi yang tidak akurat, seperti yang diungkapkan oleh responden:

> *"Agar tidak ada informasi yang simpang siur dan menjadi bola liar di kalangan media massa".*

Mengacu pada data yang telah dikumpulkan tercatat tiga (3) responden memilih mengajukan pengaduan sengketa Pers melalui kepolisian, apabila hak jawab atau hak koresi yang telah dikirimkan tidak dimuat oleh media yang terlibat. Sisanya, sejumlah 29 responden telah mengetahui bahwa langkah awal yang tepat untuk menangani media yang mengabaikan pengajuan hak jawab atau hak koreksi adalah melalui Dewan Pers. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu praktisi humas perguruan tinggi telah memiliki pemahaman dasar dalam mengelola pemberitaan negatif dengan mengirimkan hak jawab ke media terkait, dan melalui Dewan Pers sebagai upaya lanjutan apabila media yang bertanggungjawab mengabaikan permohonan tersebut.

Dalam mengolah dan menganalisis hasil data penelitian untuk mengetahui lebih dalam pengaruh yang dihasilkan pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations,* penulis menggunakan SPSS. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap pengaruh yang kuat dan signifikan dari pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations.* Hal tersebut dibuktikan dari pengujian *R-Square* yang memperoleh nilai 0,583 atau 58,3% pengetahuan regulasi media mampu mempengaruhi kemampuan *media relations,* sementara 41,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu apakah terdapat pengaruh pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations.* Dimana kedua variabel memiliki pola hubungan yang tidak linear, yang digambarkan oleh kurva model kuadratik sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Hubungan yang dihasilkan oleh variabel pengetahuan regulasi media dan kemampuan *media relations* dijelaskan dalam tiga tahap kekuatan pengaruh. Pada tahap pertama dengan rentang nilai pengetahuan 40–60, menggambarkan hubungan yang cenderung datar dimana pengetahuan regulasi media yang rendah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan *media relations*.

Di tahap menengah dengan rentang nilai pengetahuan yang lebih besar yaitu 60–80, mulai menunjukkan adanya dampak, dimana peningkatan pengetahuan mulai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan *media relations*. Tahap akhir dengan nilai pengetahuan tertinggi yaitu > 80, menggambarkan peningkatan pengetahuan regulasi media memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan kemampuan *media relations*. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada level rendah,

variabel pengetahuan regulasi media belum memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap variabel kemampuan *media relations*. Namun, ketika mencapai nilai tertentu, terbentuk korelasi dan pengaruh positif yang signifikan, dimana semakin tinggi pengetahuan regulasi media, maka semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan *media relations*.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pengetahuan Regulasi Media terhadap Kemampuan Media Relations di Humas Perguruan Tinggi yang telah dilakukan, peneliti menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan regulasi media memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemampuan *media relations* praktisi humas perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,583, yang berarti 58,3% variabel kemampuan media relations dapat dijelaskan oleh pengetahuan regulasi media. Sedangkan 41,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi peningkatan pengetahuan regulasi media, secara konsisten akan berdampak pada peningkatan kemampuan *media relations* praktisi humas perguruan tinggi.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji t), ditemukan bahwa variabel pengetahuan regulasi media secara parsial memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kemampuan *media relations*. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai T-hitung (4.885) yang lebih besar dari t-tabel dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05. Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menghasilkan nilai F-hitung (23,866) yang lebih besar dari F-tabel dengan tingkat signifikansinya 0.000 < 0.05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan "terdapat pengaruh antara pengetahuan regulasi media terhadap kemampuan *media relations* di Humas perguruan tinggi" diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak.
3. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel pengetahuan regulasi media yang diukur melalui 6 indikator berada pada kategori tinggi. Demikian pula variabel kemampuan *media relations* yang diukur melalui 3 juga berada pada kategori tinggi, dengan beberapa item mencapai kategori sangat tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktisi humas perguruan tinggi telah memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi media dan mampu mengimplementasikannya dalam praktik *media relations.*

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan, kekurangan, maupun hambatan yang dialami peneliti selama penelitian berlangsung. Beberapa keterbatasan, kekurangan, maupun hambatan diantaranya:

1. Keterbatasan sampel penelitian, dengan jumlah responden yang relatif kecil (n=32). Hal ini disebabkan beberapa perguruan tinggi yang hanya memiliki satu staf humas.
2. Penggunaan pendekatan kuantitatif membuat pengukuran kemampuan *media relations* hanya berdasarkan persepsi responden, belum mencakup pengukuran kinerja aktual berdasarkan observasi langsung.
3. Terdapat kesulitan dalam mengakses beberapa perguruan tinggi yang berpotensi menjadi subjek penelitian.

C. Saran

1. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan mengenai regulasi media di kalangan praktisi humas tergolong dalam kategori tinggi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar diadakan program pelatihan khusus yang berfokus pada pengembangan kompetensi humas, terutama yang berkaitan dengan regulasi media yang relevan dengan praktik kehumasan. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan praktisi humas dalam menghadapi dinamika regulasi media dan praktik *media relations* yang semakin kompleks.
2. Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat indikasi bahwa 41,7% dari dampak yang mempengaruhi kemampuan *media relations* masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi yang lebih mendalam mengenai praktik hubungan masyarakat dan regulasi media. Penelitian lanjutan ini dapat memberikan wawasan baru bagaimana regulasi media dapat berimplikasi pada praktik hubungan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi hubungan masyarakat serta praktik kehumasan yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anderson, L. W., Krathwohl, D., & Airasian, P. W. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.

Chatra, E., & Nasrullah, R. (2008). *Public Relations Strategi Kehumasan dalam Menghadapi Krisis*. PT Salamadani Pustaka Semesta.

Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relation*. Prenadamedia Group.

Iriantara, Y. (2005). *Media Relations: Konsep, Pendekatan dan Praktik*. Simbiosa Rekatama Media.

Jefkins, F. (2004). *Public Relations*. Erlangga.

Kountur, R. (2018). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM.

Lesly, P. (1992). *Lesly's Handbook of Public Relations and Communication*. Probus Publishing Company.

Nwosu, I. E. (2003). *Polimedia: Media and Politics in Nigeria*.

Panjaitan, H. I., & Siregar, A. E. (2004). *Menegakkan Kemerdekaan Pers: 1001 Alasan UU Pers Lex Specialis*. Serikat Penerbit Suratkabar.

Parsons, P. J. (2007). *Etika Public Relations: Panduan Praktik Terbaik*. Erlangga.

Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS.* CV. Wade Group.

Rianto, P. (2024). *Regulasi Komunikasi: Tantangan di Era Media Baru*. UII Press.

Ruslan, R. (1999). *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.

Ruslan, R. (2003). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: konsepsi dan aplikasi*. Raja Grafindo Persada.

Ruth, E. (2000). *Media Regulation in the United Kingdom* (L. Luwarso & Solahuddin, Eds.). Aliansi Jurnalis Independen.

Sambo, M. (2019). *Media Relations Kontemporer: Teori & Praktik*. Prenada Media.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. PT Pustaka Baru Press.

Syapitri, H., Amila, & Aritonang, J. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Ahlimedia Press. www.ahlimediapress.com

Wardani, D. (2008). *Media Relations Sarana Membangun Reputasi*. Graha Ilmu.

JURNAL

Angreani, N., Dammar, B., & Mattalatta. (2018). Pengaruh Kemampuan, Motivasi dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Mirai Management*, *3*(1), 150–163. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/207

Badri, M. (2016). Mengelola Konflik Perbedaan Budaya Profesi Wartawan dan Humas. *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*, *1*(1). https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/8895

Caldwell, A. K. (2022). Legal and Ethical Considerations for Public Relations Book Review. *Pepperdine Journal of Communication Research, 10*, 91-95. https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1143&context=pjcr

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education* (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.1080/19415257.2011.643130

Darsini, Fahrurrozi, & Cahyono, E. A. (2019). PENGETAHUAN ; ARTIKEL REVIEW. *Jurnal Keperawatan*, *12*(1), 95–107. https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/96

Fahruddin, A. (2023). Efektivitas Komunikasi Organisasi pada Penyelesaian Hak Jawab Berita di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi. In *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 5, Issue 1). http://repository.unpas.ac.id/62738/

Faisal, O. A. (2021). Kajian Idealitas Penyelesaian Kasus Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigasi dan Litigasi (Studi Politik Hukum UU Nomor 40 Tahun 1999). *Jurnal Verstek*. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50002

Farihanto, M. N. (2014). Teman tapi Mesra Humas dan Wartawan (Studi Kasus Strategi Hubungan Media di Bidang Humas dan Protokoler Universitas Ahmad Dahlan). *Profetik*, *7*(2), 53–64. https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/1106

Gunawan, I., & Palupi, A. R. (2012). Taksonomi Bloom - Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, *2*(2), 98–117. https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE/article/view/50/47

Maharani, R. N. L. (2013). Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas dalam melihat Nilai Berita. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *10*(1), 8396. https://doi.org/10.24002/jik.v10i1.155

Nurjanah, A., Widyasari, W., & Yulianti, D. F. (2015). *Public Relations & Media Relations (Kritik Budaya Amplop Pada Media Relations Institusi Pendidikan Di Yogyakarta)*. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1388

Oba, E., Masu, R. R., & Tungga, I. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pers Pencemaran Nama Baik Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(03), 1179–1188. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.871

Octaviana, D. R., & Ramadhani, R. A. (2021). Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowladge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama. *Jurnal Tawadhu*, *5*(2), 143–159. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/twd.v5i2.227

Prastya, N. M. (2017). Pemanfaatan Situs Web Resmi Lembaga Pendidikan sebagai Sumber Berita oleh Wartawan Surat kabar Lokal DI Yogayakarta. *JURNAL THE MESSENGER*, *9*(2), 2017. https://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/509/318

Puspita Sari, W., Putriana, M., Fatih Seif Aldien, A., Salsa Dewi, A., Claracynthia, A., Samantha Surya Kusuma, B., Zulfan Anbiya, M., & Azka Sulthan, N. (2024). *PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BEMP HUMAS DALAM MENINGKATKAN MINAT MAHASISWA BERORGANISASI (SURVEI TERHADAP MAHASISWA PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)*. *7*(1). www.ejurnal.stikpmedan.ac.id

Raissa, R., & Ahmadi, D. (2022). Kegiatan Media Relations X Regional III Jawa Barat dalam Mempertahankan Citra Positif. *Jurnal Riset Public Relations* , *2*(2), 59–66. https://doi.org/10.29313/jrpr.vi.1087

Ramadhan, F. V., & Sudarmanti, R. (2024). Jalinan Komunikasi antara Public Relations dan Jurnalis dalam Membangun Media Relations Bermakna (Studi Kasus: Tokopedia dan Kompas.com, Sub-Rubik: Money). *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, *5*(1), 832–841. https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.554

Rianto, P. (2019). Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia. *JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, *21*(2), 123–138. https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.123-138

Rosalina, L., & Anshori, M. S. (2023). Analisis Aktivitas Media Relations dalam Model Public Relations (Studi Kasus pada Biro Humas Universitas Teknologi Sumbawa). *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, *1*(3), 113–128. https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i3.942

Suherman, A., Ikawati, & Hidayatullah, M. (2023). Strategi Media Relations Humas Polres Baubau dalam Menjalin Hubungan dengan Media Lokal di Kota Baubau. *Jurnal Audiens*, *4*(3), 496–507. https://doi.org/10.18196/jas.v4i3.114

Ulfah, & Arifudin, O. (2023). Analisis Teori Taksonomi Bloom pada Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, *4*(1), 13–22.https://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/87

Widyasari, I., & A, A. L. (2020). *Strategi Media Relations Greenpeace Indonesia dalam Meningkatkan Citra Organisasi* (Vol. 11, Issue 2). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/comm.v11i2.1171

Yazid, T. P., Rasyid, A., & Hatika, M. (2022). Pengaruh Cyber Public Relations terhadap Citra Perguruan Tinggi Swasta Terfavorit di Provinsi Riau. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, *4*(4), 5734–5743. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3417

WEBSITE

Dewan Pers. (2021). *Laporan Tahunan Dewan Pers 2021 Media Berkelanjutan di Masa Pandemi*. https://dewanpers.or.id/assets/documents/laporan/LAPORAN_DEWAN_PERS_TAHUN_2021_ok.pdf

Dewan Pers. (2023, January 19). *Ketua Dewan Pers: Karya Jurnalistik Hendaknya Perkokoh Pilar Demokrasi*. Dewanpers.or.Id. https://dewanpers.or.id/berita/detail/2427/ketua-dewan-pers-karya-jurnalistik-hendaknya-perkokoh-pilar-demokrasi#

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024, October 8). *Arti Kata Regulasi*. https://www.kbbi.web.id/regulasi

Rosliana, R., & Jalil, A. (2023, June 29). *Ini Daerah yang Memiliki Kampus Paling Banyak di Yogyakarta*. Jogja.Solopos.Com. https://jogja.solopos.com/ini-daerah-yang-memiliki-kampus-paling-banyak-di-yogyakarta-1671554

Saputra, I. Y. (2023, July 21). *Dewan Pers: Ada 434 Kasus Sengketa Pers Sepanjang 2023, Terbanyak Media Online*. Espos Indonesia. https://regional.espos.id/dewan-pers-ada-434-kasus-sengketa-pers-sepanjang-2023-terbanyak-media-online-1690626?_gl=1*2hkvhj*_ga*MTUyMDU2ODkxNy4xNzMxNzU5OTUz*_ga_5RRFTQXGVW*MTczMTc1OTk1Mi4xLjEuMTczMTc1OTk4MC4wLjAuNDAwMDUwNTM5

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (1999).

Zulfikar, F. (2024, August 27). *Kenapa Jogja Jadi Tempat Favorit untuk Kuliah? Ini Alasan Kebanyakan Mahasiswa*. DetikEdu. https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7509798/kenapa-jogja-jadi-tempat-favorit-untuk-kuliah-ini-alasan-kebanyakan-mahasiswa

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ethical Clearance

KOMITE ETIK PENELITIAN
FAKULTAS PSIKOLOGI & ILMU SOSIAL BUDAYA
Gedung Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 2106, 2114
F. (0274) 898444 ext. 2106
E. etikapenelitian.fpsb@uii.ac.id
W. fpscs.uii.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No. 1712/DEK/70/DURT/VI/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti : Farah Fadila Arinalhaq
Researcher

Nama Institusi : Universitas Islam Indonesia
Name of The Institution

Dengan judul:
Title

"Pengaruh Pengetahuan Regulasi Media terhadap Kemampuan *Media Relations* in Humas Perguruan Tinggi"

"*The Influence of Media Regulation Knowledge to Media Relations Skills in University Public Relations*"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) 2011 WHO Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standards.

Pernyataan layak etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

This declaration of ethics applies during the period June 24th, 2024 until June 23rd, 2025.

Dekan/*Dean*,

Dr.Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog

June 24th, 2024
Kepala/*Chair Person*,

Dr. Hepi Wahyuningsih, S.Psi., M.Si.

Lampiran 2 : Kuesioner

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Pengetahuan Regulasi Media					
1	Saya memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep regulasi media yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers				
2	Saya dapat mengenali pasal-pasal relevan dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memiliki implikasi terhadap tugas dan tanggung jawab Humas dalam *media relations*				
3	Saya mampu menyebutkan pasal-pasal relevan dalam dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memiliki implikasi terhadap kegiatan *media relations*				
4	Saya mampu memahami dengan baik pengertian Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi				
5	Saya mampu menyebutkan pengertian Hak Tolak, Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi				
6	Saya dapat menafsirkan dengan tepat penjelasan setiap pasal dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pers				
7	Saya mampu menyimpulkan pasal-pasal penting dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pers				
8	Saya mampu menyimpulkan dengan baik fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa Pers				
9	Saya mampu menyimpulkan dengan baik ketentuan pidana jika Pers melanggar kewajiban Hak Jawab				
10	Saya mampu membandingkan hak dan kewajiban yang dimiliki Humas dan wartawan dalam penyelesaian sengketa Pers				
11	Saya mampu membandingkan hal apa yang bisa diadukan dan tidak bisa diadukan dalam penyelesaian sengketa Pers				
12	Saya mampu memberikan contoh konkret kasus Pers dalam konteks perguruan tinggi yang dapat di selesaikan sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers				
13	Saya mampu memprediksi dampak *media relations* dari setiap mekanisme penyelesaian sengketa pers yang tersedia termasuk melalui Dewan Pers, Kepolisian, ataupun Pengadilan				
14	Saya mampu menjalankan prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana telah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers				
15	Saya mampu mengimplemetasikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor:01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
20	Saya mampu menilai aspek penting dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan mengimplementasikan evaluasi tersebut dalam praktik media relations				
21	Saya mampu membuktikan apabila terdapat tindakan wartawan yang melanggar ketentuan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam konteks penyelesaian sengketa Pers				
22	Saya mampu merumuskan strategi komunikasi untuk mengelola konflik yang sesuai dengan ketentuan dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers				
23	Saya mampu merencanakan langkah-langkah dalam mengelola dan menyelesaikan permasalaham media relations yang sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers				
Kemampuan Media Relations					
1	Apabila terdapat pemberitaan negatif mengenai perguruan tinggi, maka langkah awal yang saya lakukan adalah mengirimkan Hak Jawab atau Hak Koreksi kepada Pers yang bersangkutan				
2	Apabila terdapat pemberitaan negatif, saya mampu mengelola dan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang tersedia dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers				
3	Saya mampu untuk tetap mempertahankan hubungan baik dengan wartawan dan media massa yang bersangkutan bahkan setelah penyelesaian sengketa Pers				
4	Apabila perguruan tinggi sedang mengalami krisis dan terbit berita buruk, sebagai Humas saya tidak akan meminta Pers untuk mencabutnya di luar prosedur yang tersedia				
5	Saya telah memiliki kesigapan dan kewaspadaan menghadapi segala jenis krisis yang berpotensi timbul dalam media relations				
6	Saya mampu memperlihatkan integritas sebagai Humas dan integritas perguruan tinggi kepada wartawan dan media massa				
7	Saya mampu memberikan klarifikasi pemberitaan negatif dengan baik				
8	Apabila terjadi krisis pada perguruan tinggi, saya mampu menunjuk juru bicara yang tepat untuk menerapkan prinsip berbicara dengan satu suara				
9	Saya mampu menjalin dan mempertahankan kontak dengan wartawan ataupun media massa				
10	Saya mampu menyusun dan memperbarui daftar media yang dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, e-mail, dan narahubung				

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
11	Saya mampu menyiapkan daftar kontak Humas perguruan tinggi yang dapat dihubungi oleh wartawan dan media massa				
12	Saya mampu menyampaikan berita secara jujur ketika bekerja sama dengan wartawan baik di masa sulit (krisis) maupun masa baik				
13	Saya mampu memberikan pelayanan berupa tulisan yang dianggap memiliki nilai berita dan gambar yang layak, menarik, dan aktual sesuai dengan kebutuhan wartawan				
14	Sebagai Humas perguruan tinggi saya tidak akan memohon hingga memaksa supaya berita perguruan tinggi dimuat oleh wartawan				
15	Saya mampu mempertahankan *media relations* dengan mengetahui kebutuhan media, cara kerja media, dan kode etik media				
16	Sebagai Humas perguruan tinggi, saya mampu berbicara dari sudut pandang kepentingan publik				
17	Saya mampu menghindari pertengkaran dengan wartawan maupun media massa yang tidak diperlukan				

Lampiran 2 : Tabel Uji Validitas Pengetahuan Regulasi Media

Correlations													
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
X1	Pearson Correlation	1	.964**	.775**	.675**	.686**	.749**	.749**	.648**	.843**	.697**	.765**	.755**
X2	Pearson Correlation	.964**	1	.767**	.714**	.670**	.737**	.737**	.620**	.825**	.673**	.744**	.743**
X3	Pearson Correlation	.775**	.767**	1	.604**	.708**	.776**	.843**	.587**	.815**	.667**	.736**	.634**
X4	Pearson Correlation	.675**	.714**	.604**	1	.719**	.647**	.647**	.654**	.666**	.558**	.607**	.758**
X5	Pearson Correlation	.686**	.670**	.708**	.719**	1	.839**	.839**	.823**	.728**	.794**	.895**	.828**
X6	Pearson Correlation	.749**	.737**	.776**	.647**	.839**	1	.793**	.683**	.755**	.706**	.797**	.716**
X7	Pearson Correlation	.749**	.737**	.843**	.647**	.839**	.793**	1	.683**	.755**	.790**	.872**	.716**
X8	Pearson Correlation	.648**	.620**	.587**	.654**	.823**	.683**	.683**	1	.694**	.735**	.743**	.703**
X9	Pearson Correlation	.843**	.825**	.815**	.666**	.728**	.755**	.755**	.694**	1	.638**	.669**	.683**
X10	Pearson Correlation	.697**	.673**	.667**	.558**	.794**	.706**	.790**	.735**	.638**	1	.882**	.726**
X11	Pearson Correlation	.765**	.744**	.736**	.607**	.895**	.797**	.872**	.743**	.669**	.882**	1	.797**
X12	Pearson Correlation	.755**	.743**	.634**	.758**	.828**	.716**	.716**	.703**	.683**	.726**	.797**	1
X13	Pearson Correlation	.382*	.376*	.562**	.501**	.631**	.533**	.455**	.426*	.473**	.540**	.538**	.556**
X14	Pearson Correlation	.719**	.705**	.762**	.623**	.875**	.772**	.838**	.722**	.668**	.835**	.912**	.700**
X15	Pearson Correlation	.687**	.678**	.696**	.703**	.828**	.716**	.780**	.703**	.618**	.804**	.866**	.763**
X16	Pearson Correlation	.775**	.767**	.742**	.719**	.774**	.776**	.776**	.660**	.679**	.748**	.808**	.819**
X17	Pearson Correlation	.668**	.659**	.660**	.719**	.861**	.816**	.816**	.750**	.617**	.781**	.888**	.738**
X18	Pearson Correlation	.675**	.666**	.709**	.767**	.907**	.793**	.862**	.759**	.685**	.790**	.872**	.780**
X19	Pearson Correlation	.601**	.600**	.635**	.670**	.796**	.732**	.732**	.613**	.608**	.712**	.819**	.729**
X20	Pearson Correlation	.684**	.667**	.663**	.737**	.821**	.722**	.797**	.743**	.593**	.882**	.918**	.797**
X21	Pearson Correlation	.708**	.701**	.726**	.742**	.804**	.673**	.820**	.644**	.708**	.743**	.832**	.873**
X22	Pearson Correlation	.684**	.667**	.736**	.672**	.895**	.797**	.872**	.743**	.669**	.882**	.918**	.797**
X23	Pearson Correlation	.713**	.693**	.786**	.701**	.860**	.766**	.843**	.766**	.709**	.821**	.875**	.772**

Total	Pearson Correlation	.833**	.823**	.832**	.796**	.930**	.866**	.902**	.805**	.808**	.867**	.936**	.872**

		X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	Total
X1	Pearson Correlation	.382*	.719**	.687**	.775**	.668**	.675**	.601**	.684**	.708**	.684**	.713**	.833**
X2	Pearson Correlation	.376*	.705**	.678**	.767**	.659**	.666**	.600**	.667**	.701**	.667**	.693**	.823**
X3	Pearson Correlation	.562**	.762**	.696**	.742**	.660**	.709**	.635**	.663**	.726**	.736**	.786**	.832**
X4	Pearson Correlation	.501**	.623**	.703**	.719**	.719**	.767**	.670**	.737**	.742**	.672**	.701**	.796**
X5	Pearson Correlation	.631**	.875**	.828**	.774**	.861**	.907**	.796**	.821**	.804**	.895**	.860**	.930**
X6	Pearson Correlation	.533**	.772**	.716**	.776**	.816**	.793**	.732**	.722**	.673**	.797**	.766**	.866**
X7	Pearson Correlation	.455**	.838**	.780**	.776**	.816**	.862**	.732**	.797**	.820**	.872**	.843**	.902**
X8	Pearson Correlation	.426*	.722**	.703**	.660**	.750**	.759**	.613**	.743**	.644**	.743**	.766**	.805**
X9	Pearson Correlation	.473**	.668**	.618**	.679**	.617**	.685**	.608**	.593**	.708**	.669**	.709**	.808**
X10	Pearson Correlation	.540**	.835**	.804**	.748**	.781**	.790**	.712**	.882**	.743**	.882**	.821**	.867**
X11	Pearson Correlation	.538**	.912**	.866**	.808**	.888**	.872**	.819**	.918**	.832**	.918**	.875**	.936**
X12	Pearson Correlation	.556**	.700**	.763**	.819**	.738**	.780**	.729**	.797**	.873**	.797**	.772**	.872**
X13	Pearson Correlation	1	.663**	.628**	.562**	.511**	.611**	.693**	.538**	.555**	.622**	.652**	.649**
X14	Pearson Correlation	.663**	1	.943**	.826**	.866**	.904**	.796**	.840**	.732**	.840**	.811**	.918**
X15	Pearson Correlation	.628**	.943**	1	.881**	.878**	.908**	.803**	.866**	.806**	.797**	.772**	.908**
X16	Pearson Correlation	.562**	.826**	.881**	1	.880**	.776**	.712**	.808**	.796**	.736**	.712**	.890**
X17	Pearson Correlation	.511**	.866**	.878**	.880**	1	.892**	.832**	.888**	.764**	.805**	.766**	.904**
X18	Pearson Correlation	.611**	.904**	.908**	.776**	.892**	1	.892**	.872**	.820**	.872**	.843**	.934**
X19	Pearson Correlation	.693**	.796**	.803**	.712**	.832**	.892**	1	.819**	.835**	.819**	.782**	.860**

X20	Pearson Correlation	.538**	.840**	.866**	.808**	.888**	.872**	.819**	1	.832**	.918**	.875**	.913**
X21	Pearson Correlation	.555**	.732**	.806**	.796**	.764**	.820**	.835**	.832**	1	.832**	.801**	.889**
X22	Pearson Correlation	.622**	.840**	.797**	.736**	.805**	.872**	.819**	.918**	.832**	1	.960**	.925**
X23	Pearson Correlation	.652**	.811**	.772**	.712**	.766**	.843**	.782**	.875**	.801**	.960**	1	.913**
Total	Pearson Correlation	.649**	.918**	.908**	.890**	.904**	.934**	.860**	.913**	.889**	.925**	.913**	1

Lampiran 3 : Tabel Uji Validitas Kemampuan Media Relations

Correlations										
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
Y1	Pearson Correlation	1	.479**	.384*	.488**	.405*	0,267	0,294	.432*	.412*	.515**
Y2	Pearson Correlation	.479**	1	.552**	.417*	.422*	.448*	.372*	.418*	.443*	.381*
Y3	Pearson Correlation	.384*	.552**	1	.487**	.673**	.647**	.579**	.770**	.773**	.646**
Y4	Pearson Correlation	.488**	.417*	.487**	1	.528**	.313	.568**	.548**	.572**	.325
Y5	Pearson Correlation	.405*	.422*	.673**	.528**	1	.741**	.576**	.758**	.784**	.665**
Y6	Pearson Correlation	0,267	.448*	.647**	.313	.741**	1	.647**	.728**	.723**	.804**
Y7	Pearson Correlation	0,294	.372*	.579**	.568**	.576**	.647**	1	.770**	.773**	.540**
Y8	Pearson Correlation	.432*	.418*	.770**	.548**	.758**	.728**	.770**	1	.870**	.727**
Y9	Pearson Correlation	.412*	.443*	.773**	.572**	.784**	.723**	.773**	.870**	1	.705**
Y10	Pearson Correlation	.515**	.381*	.646**	.325	.665**	.804**	.540**	.727**	.705**	1
Y11	Pearson Correlation	.226	.382*	.484**	.130	.524**	.684**	.484**	.544**	.606**	.574**
Y12	Pearson Correlation	.292	.216	.626**	.168	.475**	.571**	.517**	.705**	.656**	.743**
Y13	Pearson Correlation	.172	.327	.727**	.366*	.528**	.562**	.727**	.818**	.794**	.531**
Y14	Pearson Correlation	.443*	.417*	.688**	.354*	.614**	.636**	.688**	.775**	.742**	.833**
Y15	Pearson Correlation	.376*	.429*	.727**	.457**	.639**	.676**	.727**	.818**	.794**	.769**
Y16	Pearson Correlation	.548**	.432*	.359*	.153	.268	.242	.458**	.404*	.400*	0,332
Y17	Pearson Correlation	.317	.218	.655**	.258	.593**	.816**	.655**	.737**	.696**	.674**
Total	Pearson Correlation	.561**	.584**	.827**	.564**	.788**	.807**	.795**	.904**	.900**	.825**

Correlations									
		Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Total
Y1	Pearson Correlation	0,226	0,292	0,172	.443*	.376*	.548**	0,317	.561**
Y2	Pearson Correlation	.382*	0,216	0,327	.417*	.429*	.432*	0,218	.584**
Y3	Pearson Correlation	.484**	.626**	.727**	.688**	.727**	.359*	.655**	.827**
Y4	Pearson Correlation	.130	.168	.366*	.354*	.457**	.153	0,258	.564**
Y5	Pearson Correlation	.524**	.475**	.528**	.614**	.639**	.268	.593**	.788**
Y6	Pearson Correlation	.684**	.571**	.562**	.636**	.676**	.242	.816**	.807**
Y7	Pearson Correlation	.484**	.517**	.727**	.688**	.727**	.458**	.655**	.795**
Y8	Pearson Correlation	.544**	.705**	.818**	.775**	.818**	.404*	.737**	.904**
Y9	Pearson Correlation	.606**	.656**	.794**	.742**	.794**	.400*	.696**	.900**
Y10	Pearson Correlation	.574**	.743**	.531**	.833**	.769**	.332	.674**	.825**
Y11	Pearson Correlation	1	.685**	.551**	.596**	.551**	.243	.551**	.681**
Y12	Pearson Correlation	.685**	1	.837**	.890**	.837**	.417*	.714**	.782**
Y13	Pearson Correlation	.551**	.837**	1	.809**	.866**	.485**	.758**	.820**
Y14	Pearson Correlation	.596**	.890**	.809**	1	.938**	.567**	.699**	.890**
Y15	Pearson Correlation	.551**	.837**	.866**	.938**	1	.597**	.758**	.911**
Y16	Pearson Correlation	.243	.417*	.485**	.567**	.597**	1	.436*	.565**
Y17	Pearson Correlation	.551**	.714**	.758**	.699**	.758**	.436*	1	.799**
Total	Pearson Correlation	.681**	.782**	.820**	.890**	.911**	.565**	.799**	1

Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Regulasi Media dan Kemampuan Meedia Relations

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.985	23

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.950	17

Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.40295182
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.107
	Negative	-.132
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.167[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 6 : Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kemampuan Media Relations * Pengetahuan Regulasi Media	Between Groups	(Combined)	1619.375	23	70.408	102.411	.000
		Linearity	719.926	1	719.926	1047.166	.000
		Deviation from Linearity	899.449	22	40.884	59.468	.000
	Within Groups		5.500	8	.688		
	Total		1624.875	31			

Lampiran 7 : Model Linear

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.666	.443	.425	5.492

The independent variable is Pengetahuan Regulasi Media.

Lampiran 8 : Model Quadratic

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.764	.583	.555	4.831

The independent variable is Pengetahuan Regulasi Media.

Lampiran 9 : Model S

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.533	.284	.260	.119

The independent variable is Pengetahuan Regulasi Media.

Lampiran 10 : Model Exponential

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.626	.392	.371	.110

The independent variable is Pengetahuan Regulasi Media.